



NASIONAL

Banjir Rendam Aceh dan Sumut, Ribuan Warga Terdampak hingga 1.985 KK di Subulussalam

Oleh Van · 30 Okt, 23.16 WIB



Informasi terkini mengenai penanggulangan bencana disampaikan secara resmi oleh BNPB.

Sumut — Banjir melanda sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh serta Sumatera Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ribuan warga terdampak, dengan sejumlah rumah terendam dan akses jalan sempat lumpuh akibat genangan air.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan

dikutip dari YouTube BNPB Indonesia Jumat, (30/10/2026) menyampaikan bahwa data dampak banjir di sejumlah wilayah tersebut berasal dari laporan kejadian pada 28 dan 29 Oktober 2026.

"Adapun dampak 691 KK di Kabupaten Langkat yang disebut berikut merujuk pada laporan Rabu (28/10)," ujar Berton.

Di Sumatera Utara, banjir dilaporkan terjadi di Kabupaten Langkat, Mandailing Natal (Madina), Asahan, hingga Kota Medan.

Sementara di Aceh, genangan banjir melanda Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

Berdasarkan data BNPB, banjir di Kabupaten Langkat berdampak terhadap 691 kepala keluarga (KK). Dampak tersebut merujuk

pada laporan kejadian Rabu (28/10/2026).

Di Kabupaten Mandailing Natal, banjir menerjang Desa Binanga, Kecamatan Huta Bargot, dan Desa Rumbio, Kecamatan Panyabungan Utara.

Luapan Sungai Simalagi setelah hujan deras pada Rabu (28/10) menyebabkan 32 rumah terendam dan ...

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

8 Desa Wisata sebagai Destinasi Gathering dan Outing Karyawan yang Seru dan Berkesan!



Seharian bertemu rekan kerja, tapi obrolan tak jauh dari pekerjaan? Rapat beruntun dan tenggat padat membuat tim dekat secara jadwal, tapi renggang secara hubungan.

Desa wisata bisa jadi jawabannya. Suasananya berbeda dari

kantor maupun ballroom hotel: peserta menyusuri kampung, mengenal tradisi warga, dan mencoba aktivitas kelompok di alam ...

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MA Nyatakan Suket Gibran Tidak Sah, Denny Indrayana: Mas Gibran Mundur Deh



BANDA ACEH – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mendesak Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Desakan itu disampaikan menyusul putusan Mahkamah

Agung (MA) yang mengabulkan gugatan kasasi advokat Subhan Palal, yang meminta Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran untuk Pilpres 2024 dinyatakan ...

Selengkapnya di halaman 4 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	9
EKONOMI	12
OPINI	14
Aneka Berita	16

ACEH

Bupati Syech Muharram Saksikan Langsung Final Tilawatil Quran MTQ ke-35 Aceh Besar



BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris menyaksikan langsung babak final cabang Tilawatil Quran golongan dewasa pada

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 Aceh Besar yang berlangsung di Kecamatan Kuta Baro, Kamis (29/10/2026) malam.

Selengkapnya di halaman 9 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MA Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran, Denny Indrayana: Apa Dasar Masih Menjabat Wapres?



BANDA ACEH - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil

Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diterbitkan melalui e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

14 BERITA

NASIONAL

Banjir Rendam Aceh dan Sumut, Ribuan Warga Terdampak hingga 1.985 KK di Subulussalam

Oleh Van · 30 Okt, 23.16 WIB



Informasi terkini mengenai penanggulangan bencana disampaikan secara resmi oleh BNPB.

Sumut — Banjir melanda sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh serta Sumatera Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ribuan warga terdampak, dengan sejumlah rumah terendam dan akses jalan sempat lumpuh akibat genangan air.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dikutip dari YouTube BNPB Indonesia Jumat, (30/10/2026) menyampaikan bahwa data dampak banjir di sejumlah wilayah tersebut berasal dari laporan kejadian pada 28 dan 29 Oktober 2026.

"Adapun dampak 691 KK di Kabupaten Langkat yang disebut

berikut merujuk pada laporan Rabu (28/10)," ujar Berton.

Di Sumatera Utara, banjir dilaporkan terjadi di Kabupaten Langkat, Mandailing Natal (Madina), Asahan, hingga Kota Medan.

Sementara di Aceh, genangan banjir melanda Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

Berdasarkan data BNPB, banjir di Kabupaten Langkat berdampak terhadap 691 kepala keluarga (KK). Dampak tersebut merujuk pada laporan kejadian Rabu (28/10/2026).

Di Kabupaten Mandailing Natal, banjir menerjang Desa Binanga, Kecamatan Huta Bargot, dan Desa Rumbio, Kecamatan Panyabungan Utara.

Luapan Sungai Simalagi setelah hujan deras pada Rabu (28/10)

menyebabkan 32 rumah terendam dan satu fasilitas ibadah terdampak.

Genangan air juga sempat membuat akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Namun, berdasarkan laporan BNPB, kondisi banjir berangsur surut dan jalan yang sebelumnya terendam kembali dapat dilalui.

Sementara itu, banjir di Kabupaten Asahan merendam Desa Sei Silau Tua dan Desa Bangun Sari, Kecamatan Setia Janji.

Sebanyak 3.610 jiwa terdampak, terdiri dari 2.910 jiwa di Desa Sei Silau Tua dan 700 jiwa di Desa Bangun Sari.

Ketinggian air di wilayah tersebut berkisar 30 hingga 80 sentimeter. BNPB juga mencatat seba-

nyak 405 rumah terdampak serta dua fasilitas pendidikan dan akses jalan antardesa ikut terkena dampak.

Banjir turut terjadi di Kota Medan dan merendam permukiman warga, salah satunya di kawasan Kampung Aur.

Banjir Landa Aceh, 1.985 KK Terdampak di Subulussalam

Di Provinsi Aceh, banjir melanda Gampong Lhok Raya dan Gampong Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

Hujan lebat pada Rabu (28/10) memicu luapan Sungai Lae Soraya dan Kruen Trumon Raya hingga menggenangi permukiman warga.

Selain itu, banjir di Kota Subulussalam berdampak terhadap 1.985 KK.

NASIONAL

MA Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran, Denny Indrayana: Apa Dasar Masih Menjabat Wapres?

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.44 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diterbitkan melalui e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.

Menanggapi putusan tersebut, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menilai perkembangan ini penting bagi dinamika hukum tata negara di Indonesia. Menurutnya, putusan kasasi MA memperkuat argumen mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Dengan suket batal, apalagi dasar Saudara Gibran masih tanpa malu duduk sebagai wakil presiden? Tinggal dua nih modal beliau, mundur. Untuk mundur itu hanya dua lagi modalnya, tau diri dan tau malu," kata Denny, Jumat (30/10/2026).

Denny menilai putusan MA dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menjadi bagian dari perkembangan hukum yang perlu dicermati. Dia menyebut MK sebelumnya telah menyoroit persoalan ijazah setara SMA, sedangkan MA kini mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Dia menambahkan, surat keterangan penyetaraan itu merupakan dokumen yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bukti pemenuhan persyaratan pendidikan setara SMA saat

pendaftaran Pilpres 2024. Menurut Denny, pembatalan dokumen tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum dan etika Gibran sebagai wakil presiden.

"Prinsip etika itu adalah fondasi dari hukum (moral principle is the foundation of law). Kalau sudah dinyatakan suketnya ini batal, ya mundur dong," kata Denny.

Denny juga menilai putusan tersebut berpotensi menjadi rujukan dalam gugatan lain terkait Pemilu 2024 yang masih berjalan di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Dia berharap lembaga peradilan lain mempertimbangkan putusan MA tersebut secara konsisten sesuai kewenangannya.

Dalam gugatannya, Subhan Palal menggugat Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak penerbit dokumen.

Dia mengajukan tiga tuntutan utama, yakni meminta pengadilan menyatakan surat keterangan penyetaraan tidak sah, memerintahkan pencabutan dokumen dari pihak yang menguasai atau memegangnya, serta mengabulkan seluruh permohonan penggugat.

Subhan Palal mengonfirmasi telah menerima pemberitahuan resmi mengenai amar putusan kasasi dari MA. Meski pertimbangan hukum lengkap atau ratio decidendi belum diunggah secara menyeluruh di situs resmi MA, dia menyatakan amar pokok putusan telah mengabulkan seluruh gugatannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ulama Terawang Nasib Gibran: Ini Enggak Lama Lagi, Insyallah Paling 2 Bulan Lah

Oleh Redaksi · 29 Okt, 22.02 WIB

BANDA ACEH - Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus dibayangi pusaran polemik dan spekulasi Politik menyusul dugaan skandal terkait dengan dokumen pendidikannya, yang digunakan untuk mencalonkan dirinya di Pilpres 2024.

Ketua Umum Partai Ummat, Ansufri Idrus Sambo (Ustaz Sambo) bahkan mengatakan

bahwa polemik tersebut akan membuat politikus itu kehilangan jabatan wakil presiden dalam waktu dekat. Menurutnya, hal tersebut hanyalah persoalan waktu.

"Nah itulah menurut perkiraan saya, dia ini nggak lama lagi. Ini hanya menunggu it's just the matter of time saja," kata Ustad Sambo dikutip Kamis (29/10/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ternyata Ini Alasan Denny Indrayana Cabut Gugatan Ijazah Gibran di PTUN

Oleh Redaksi · 29 Okt, 20.05 WIB

BANDA ACEH -Penggugat ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana mengungkapkan alasan walk out dan mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Adapun gugatan di PTUN ini terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.

Aksi walk out itu disampaikan Denny Indrayana di akun pribadi miliknya di Instagram.

"Hari ini Saya dan Tim Kuasa Hukum mencabut gugatan dan Walk Out dari sidang PTUN terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran," tulis Denny, dikutip Kamis (29/10/2026).

Denny mengungkap alasannya walk out karena pihak tergugat yakni Kementerian Pendidikan,

tidak kunjung menghadirkan bukti apapun yang bisa menjadi dasar terbitnya suket untuk Gibran.

Denny pun aneh karena tergugat yakni pihak Gibran keberatan saat timnya mencabut gugatan.

"Setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh ketua majelis, tidak kunjung menghadirkan bukti apapun yang menjadi dasar terbitnya Suket," tulis Denny.

"Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya Suket, Tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan. Kok bisa? Ada apa?" tulis Denny menutup status di akunnya.

Gugatan terhadap suket penyetaraan pendidikan Gibran di PTUN diajukan pada 15 Juli 2026.

Pada kasus ini, pihak penggugat tercatat sebagai PT Mercy Toga Kirana sementara tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.

Petitus penggugat yakni meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Surat Keputusan Nomor 9149 itu jadi dasar penilaian administratif yang digunakan KPU RI saat memeriksa persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menunjukkan berkas sali-

nan riwayat pendidikan kliennya kepada awak media dan majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dokumen fotokopi berwarna itu dilampirkan dalam berkas jawaban setebal 69 halaman dari pihak Gibran selaku Tergugat II Intervensi.

"Dan kami sudah siap untuk membacakan dan memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dan juga kepada rekan-rekan media sebagai bentuk keterbukaan kami kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa riwayat pendidikan dari Bapak Gibran Rakabuming kami sudah lampirkan dalam jawaban kami setebal 69 halaman," kata Rullyandi usai persidangan

NASIONAL

8 Desa Wisata sebagai Destinasi Gathering dan Outing Karyawan yang Seru dan Berkesan!

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.11 WIB



Seharian bertemu rekan kerja, tapi obrolan tak jauh dari pekerjaan? Rapat beruntun dan tenggat padat membuat tim dekat secara jadwal, tapi renggang secara hubungan.

Desa wisata bisa jadi jawabannya. Suasananya berbeda dari kantor maupun ballroom hotel: peserta menyusuri kampung, mengenal tradisi warga, dan mencoba aktivitas kelompok di alam terbuka.

Artikel ini merangkum delapan desa wisata untuk gathering karyawan, dari Yogyakarta hingga Banyuwangi. Detail program rombongan tetap perlu dikonfirmasi ke pengelola.

Mengapa Desa Wisata Cocok untuk Gathering dan Outing Karyawan?

Tanpa meja rapat dan notifikasi, rekan kerja lebih leluasa mengo-

bol. Aktivitas alam, budaya, dan keseharian warga juga membuka banyak pilihan wisata outbound karyawan. Gathering tidak otomatis menaikkan produktivitas, tetapi kegiatan yang dirancang baik bisa memperkuat komunikasi tim.

Pilih destinasi sesuai tujuan acara, jumlah peserta, akses, dan fasilitas agar tempat gathering perusahaan benar-benar pas.

8 Desa Wisata yang Cocok untuk Gathering dan Outing Karyawan

1. Desa Wisata Pentingsari, Yogyakarta

Dusun Pentingsari berada di Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, di kawasan Merapi. Desa ini diresmikan sebagai desa wisata pada 2008 dan meraih penghargaan desa wisata berkelanjutan 2020.

Atraksi bertani, berkebun, dan homestay warga membuka peluang tim berbaur sambil mengerjakan sesuatu bersama. Jenis kegiatan perlu dikonfirmasi ke pengelola.

WisataHappy by Happy Tour ID bisa jadi opsi untuk acara serupa di Yogyakarta lewat paket gathering Jogja, dengan aktivitas, transportasi, dan susunan acara yang menyesuaikan kebutuhan. Boleh konsultasi dulu.

2. Desa Wisata Pulesari, Sleman

Pulesari, atau Dewi Pule, berada di Wonokerto, Turi, Sleman, lereng Merapi. Pada 2019 desa ini juara pertama dari 47 desa wisata Sleman.

Konsepnya Go Green and Back to Nature, dengan atraksi belajar budidaya. Cocok untuk outing

santai yang sekaligus menambah wawasan.

3. Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul

Nglanggeran di Patuk, Gunungkidul, sekitar 25 kilometer dari Yogyakarta, dikenal lewat gunung api purba. Desa ini pernah dinobatkan Best Tourism Village oleh UNWTO.

Jalur ke puncak, embung, dan air terjun cocok untuk outing petualangan. Siapkan alternatif ringan bagi peserta yang kurang nyaman beraktivitas fisik.

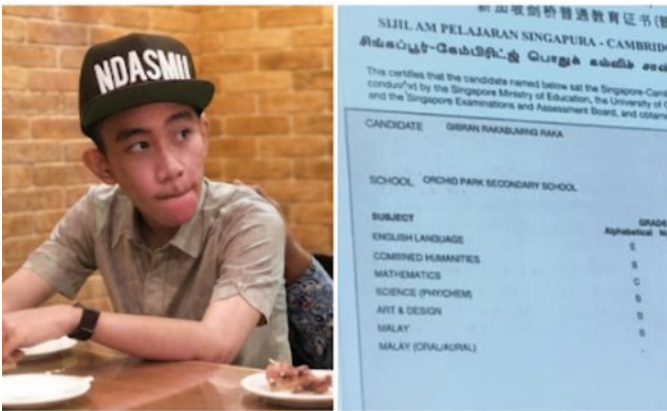
4. Desa Wisata Penglipuran, Bali

Penglipuran, desa adat di Kecamatan Bangli, Bali, sekitar 45 kilometer dari Denpasar. Tata ruangnya mengikuti konsep Tri Mandala, dengan gerbang rumah angkul-angkul yang seragam.

NASIONAL

Laskar Cinta Jokowi: Nilai Gibran E Itu Excellent, C Clever

Oleh Redaksi · 30 Okt, 23.36 WIB



BANDA ACEH - Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik nilai akademik yang kembali menjadi perbincangan publik. Ia menilai terdapat upaya pembungkahan negatif atau framing untuk membangun persepsi buruk terhadap Gibran.

Suhandono menegaskan, nilai Gibran yang beredar dengan keterangan E berarti Excellent, C berarti Clever, dan B berarti Brilliant.

Menurut dia, penilaian tersebut tidak semestinya langsung digunakan untuk meragukan kecerdasan maupun kemampuan akademik putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.

“Gibran seorang yang cerdas dan sekolahnya di Australia dan Singapura. Ada upaya framing jahat menjatuhkan Gibran,” ungkap Suhandono, Jumat (30/10/2026).

Ia menilai latar belakang pendidikan Gibran di luar negeri juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan publik dalam melihat kapasitas pribadi Wakil Presiden. Karena itu, polemik mengenai nilai akademik seharusnya dibahas secara objektif, bukan dijadikan

alat untuk membentuk opini negatif.

Menurut Suhandono, perdebatan mengenai dokumen pendidikan dan penafsiran nilai tidak boleh dicampuradukkan dengan penilaian terhadap kemampuan seseorang. Penjelasan mengenai sistem penilaian harus merujuk pada dokumen resmi dan keterangan lembaga pendidikan yang menerbitkannya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menerima informasi yang beredar tanpa memeriksa sumber dan keasliannya. Apalagi, isu pendidikan Gibran telah menjadi bagian dari perdebatan Politik yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan.

Suhandono berpandangan, kritik terhadap Wakil Presiden merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui narasi yang bertujuan menjatuhkan seseorang.

Dengan demikian, ia meminta polemik nilai akademik Gibran ditempatkan secara proporsional.

“Saat ini kebencian ke Jokowi dan Gibran sudah di luar nalar,” pungkas Suhandono.

NASIONAL

Belajar dari Bung Hatta, Roy Suryo: Enggak Usah Ada Wapres hingga 2029

Oleh Redaksi · 29 Okt, 22.08 WIB

JAKARTA - Roy Suryo menyatakan lebih memilih Indonesia tanpa wakil presiden hingga 2029.

Ia menyebut sejarah republik pernah mengalami masa tanpa wapres dan menilai hal itu bisa terulang.

Pernyataan ini disampaikan dalam program Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang tayang 28 Oktober 2026.

Pembawa acara menanyakan sikapnya secara langsung, apakah ia lebih memilih tanpa wapres dibandingkan dengan adanya wapres saat ini.

Roy menjawab singkat, “Iya.” Ketika ditanya alasannya, ia menyebut soal beban biaya.

“Daripada beban. Beban untuk negara ini membiayai Wapres ini kan luar biasa,” ujarnya.

Roy mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjalani masa tanpa wakil presiden setelah Mohammad Hatta mundur.

Ia menjelaskan bahwa pada 1945 hingga era Republik Indonesia Serikat, Soekarno dan Hatta masih berpasangan.

“Tujuh tahun kemudian tahun 57, itu Bung Hatta dengan kenegawanannya, dengan kelogowannya mengundurkan diri,” kata Roy.

Menurutnya, setelah itu kursi wapres kosong selama sekitar satu dasawarsa.

“Sehingga selama 10 tahun sampai dengan tahun 67 dan di tengah-tengahnya ada peristiwa G30S/PKI, maka di ruangnya Pak Harto waktu itu hanya ada Bung Karno, ya, itu memang Indonesia tanpa Wapres,” ujarnya.

Ia merujuk pada adegan film G30S/PKI produksi 1984 yang memperlihatkan ruang Kostrad hanya berisi foto Garuda dan foto Bung Karno.

“Indonesia kan pernah punya pengalaman tanpa wapres gitu loh,” kata Roy.

Dari sisi pembiayaan, Roy mengaitkannya dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebut pembangunan IKN tidak ada gunanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Cium Agenda Tersembunyi, Publik Curiga Jokowi Diam-diam Menjadi Antek Asing

Oleh Redaksi · 29 Okt, 22.21 WIB

BANDA ACEH - Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan ijazahnya kini merambat pada munculnya kecurigaan berskala geopolitik terhadap sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini menyusul adanya sekelompok massa yang menggeruduk kediaman Jokowi di Solo.

Perwakilan Massa, Bangun Sutoto secara terbuka menyuarakan dugaan mengenai adanya intervensi kekuatan luar di balik ngototnya sang mantan presiden dalam mempertahankan pengaruh Politik dinasti keluarganya dalam pemerintahan dari Prabowo Subianto.

Tuduhan Jokowi diam-diam bertindak sebagai perpanjangan

tangan atau 'antek asing' ini didasari oleh rekam jejak sejumlah kebijakan strategis selama dua periode pemerintahannya yang dinilai lebih banyak menguntungkan pihak luar ketimbang kepentingan kedaulatan nasional.

“Tapi bapak lain daripada yang lain. Kami menduga ada agenda tersembunyi dari negara asing yang masih menghendaki rezim bapak untuk tampil kembali karena kebijakan-kebijakan Bapak yang banyak menguntungkan mereka di saat bapak menjabat sebagai presiden,” kata Bangun dikutip Kamis (29/10/2026).

Menurut Bangun, besarnya kepentingan pihak asing untuk mengamankan aset dan kebijakan yang telah disepakati pada era

sebelumnya menjadi katalis utama mengapa mantan gubernur tersebut diduga merekayasa konstitusi untuk mendudukkan Gibran di Wakil Presiden.

Hal ini membuatnya terlihat sangat berbeda dibandingkan enam presiden sebelumnya yang bersedia melepaskan panggung politik sepenuhnya ketika masa jabatan mereka berakhir.

Penempatan Gibran di struktur tertinggi negara dianggap berbahaya jika benar-benar dikendalikan oleh kepentingan eksternal.

Bangun menegaskan bahwa saat ini kesadaran masyarakat telah terbangun, terbukti dari masifnya eskalasi tuntutan yang menyuarakan agar wapres terkini segera meletakkan jabatannya.

“Diperparah lagi, saat ini sudah banyak rakyat yang meminta saudara Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri,” tandasnya.

Adapun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri dikabarkan perlahan tengah menjauhi sosok dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini salah satunya ditenggarai oleh penyampaian hal berbeda terkait peluang duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029.

Jokowi saat ini mengatakan pembahasan terkait pilpres masih jauh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MA Nyatakan Suket Gibran Tidak Sah, Denny Indrayana: Mas Gibran Mundur Deh

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.51 WIB



BANDA ACEH – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mendesak Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Desakan itu disampaikan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan kasasi advokat Subhan Palal, yang meminta Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran untuk Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah.

Denny menilai, dikabulkannya gugatan tersebut semakin memperkuat persoalan mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Gibran sebagai wakil presiden.

Menurut dia, putusan MA memiliki konsekuensi terhadap keberadaan Suket yang selama ini menjadi salah satu dasar pemenu-

han persyaratan pendidikan Gibran.

"Gugatan Pak Subhan dikabulkan, logikanya permohonan Pak Subhan untuk pembatalan suket batal. Jadi artinya memang batal suketnya ya," kata Denny Indrayana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/10).

Denny mempertanyakan dasar yang masih digunakan Gibran untuk tetap menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia setelah adanya putusan tersebut.

Dia menilai, pembatalan Suket itu semestinya menjadi persoalan serius bagi keberlanjutan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.

"Dengan suket batal, apalagi dasar Saudara Gibran masih tanpa malu duduk sebagai wakil presiden?" tegas Denny.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyebut butuh kesadaran bagi Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden.

"Tinggal dua nih modal beliau. Mundur, untuk mundur itu hanya dua lagi modalnya: tahu diri dan tahu malu," cetus Denny.

Denny turut menyinggung gugatan yang diajukan Mercy Chriesty Barends di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dia menilai, putusan MA yang mengabulkan gugatan Subhan Palal semakin memperkuat argumentasi agar gugatan Mercy di PTUN juga dikabulkan.

"Tapi kalau ini jalan, mestinya PTUN tidak boleh bertentangan dengan Mahkamah Agung dong, iya dong? Makin kuat argumentasi agar gugatan Bu Mercy di

PTUN juga dikabulkan," ungkap Denny.

Denny juga menilai terdapat keselarasan antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA mengenai persoalan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden, khususnya terkait ketentuan pendidikan.

Dia berpandangan, kedua putusan tersebut semakin memperkuat argumentasi mengenai persoalan pemenuhan syarat pencalonan Gibran.

"Karena MK dan MA sejalan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat wakil presiden, terutama syarat pendidikan," paparnya.

Lebih lanjut, Denny kembali menyampaikan desakan agar Gibran mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden.

NASIONAL

PERBAKIN: Rapat Bersama, Hasilnya ke Mana?

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.37 WIB



OLEH: UMAR SURYA FANA

DALAM olahraga menembak, sasaran harus jelas dan aturan wajib dipatuhi. Peluru melenceng sedikit, nilai berkurang. Namun, dalam urusan organisasi, tampaknya sedang muncul pertanyaan menarik: kalau keputusan melencong dari hasil rapat, siapa yang menghitung nilainya?

Pertanyaan itu layak dialamatkan kepada PB PERBAKIN. Rakernas pada 18-19 Juli 2026 telah menghasilkan berita acara, keputusan, serta usulan susunan Tim Penjaringan dan Penyaringan atau TPP bakal calon ketua umum. Ada pembahasan, ada nama, ada tanda tangan pimpinan sidang. Pendeknya, ini bukan hasil obrolan sambil menunggu kopi.

Berita acara mencatat nama Mus Mulyadi, Rasminto, Teguh Prinar-yanto, Hendro Susanto, dan Dedi Suprpto dalam susunan usulan TPP. Forum juga mengamankan ketua umum menjalankan hasil Rakernas serta menugaskan sekretaris jenderal mengurus administrasi pembentukannya. Pesannya cukup terang, bahkan tanpa bantuan teropong bidik.

Lalu terbit SKEP Nomor 031/SKEP/KU/PB/X/2026, tanggal 28 Oktober 2026. Susunannya berubah total: Tarmizi, Andri Yuliyanto, H. Sarifudin A Darmasyah, Jeffry Subarkah, dan Misransyah. Lima nama dari forum berganti lima nama lain. Ini sudah melampaui salah ketik. Salah ketik biasanya mengganti huruf, bukan mengganti satu rombongan.

Di sinilah PB perlu menjelaskan dasar dan proses perubahan tersebut. Benar, berita acara menggunakan istilah "usulan". Tetapi usulan hasil forum resmi, disertai mandat pelaksanaan, tentu membutuhkan perlakuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kata "usulan" jangan sampai menjadi pintu darurat untuk mengungsikan seluruh kehendak peserta rapat.

Kalau ada alasan aturan, bukalah aturannya. Kalau ada keberatan atas proses Rakernas, jelaskan keberatannya. Kalau ada keputusan organisasi yang mengubah hasil forum, tunjukkan dokumennya. Pengurus berhak memberikan penjelasan, dan anggota berhak mengujinya. Organisasi sehat tidak membutuhkan ilmu kebatinan untuk memahami keputusan pengurusnya.

Tanpa penjelasan yang memadai, perubahan menyeluruh itu patut dibaca sebagai pengingkaran terhadap mandat Rakernas. Di situlah kata "pengkhianatan" memperoleh bobot moralnya: ketika kesepakatan yang dibangun bersama kehilangan tempat dalam pelaksanaan. Kritik ini menyasar pertanggungjawaban keputusan, tanpa perlu menebak isi kepala siapa pun.

Sebab, bila rapat hanya berlaku selama hasilnya cocok dengan selera pimpinan, kita perlu jujur meninjau nama acaranya. Mungkin cukup "Temu Ramah Nasional". Peserta datang, berfoto, menerima kudapan, lalu pulang. Setidaknya orang tidak keliru berharap bahwa pendapatnya ikut menentukan perjalanan organisasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Parpol Mulai Balik Badan, Sosok Kuat Ini Disebut Jadi Satu-satunya Tumpuan Jokowi

Oleh Redaksi · 29 Okt, 21.44 WIB

BANDA ACEH - Di tengah polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hubungan Politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah partai politik (parpol) menjadi sorotan.

Pengamat Politik M. Tri Andika menilai, dalam situasi saat ini, peluang para ketua umum parpol untuk bertemu dengan Jokowi terbilang kecil.

"Dengan posisi Pak Jokowi yang lemah hari ini, sulit membayangkan bahwa partai-partai politik,

ketum-ketum partai politik mau membuka pintu untuk bernegosiasi untuk bertemu bahkan sekedar bertemu dengan Pak Jokowi," ujarnya dalam kanal YouTube tvOneNews, dikutip Kamis (29/10).

"Karena siapapun yang bertemu Pak Jokowi pada hari ini ya itu bisa ditafsirkan secara liar oleh pihak-pihak yang berkepentingan git," imbuhnya.

Andika menilai, dalam situasi tersebut, Jokowi perlu menjaga hubungan baik dengan Presiden Prabowo Subianto.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Isu Reshuffle Mencuat! Gerindra Sebut Menteri dari Golkar, PAN, dan PSI Kena

Oleh Redaksi · 29 Okt, 21.49 WIB

BANDA ACEH - Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad, menyoroti kinerja sejumlah menteri yang dinilainya belum memberikan dukungan memadai terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto. Tiga nama yang menjadi perhatiannya adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal, Kamrussamad mengangkat persoalan layanan publik, terutama pemadaman listrik yang disebutkan telah berlangsung selama 10 bulan. Menurutnya, gangguan tersebut berpotensi merusak rantai pasok ekonomi di daerah.

"Kementerian teknis yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pemadaman listrik yang sudah 10 bulan berjalan. Karena itu bisa merusak rantai pasok ekonomi di daerah-daerah," kata Kamrussamad, dikutip Kamis (29/10/2026).

Ia menilai pergantian Direktur Utama PLN belum cukup untuk menyelesaikan persoalan karena menteri tetap memiliki peran penting sebagai regulator. Akbar Faizal kemudian menyela pembicaraan dengan menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Maksud Anda adalah Menteri ESDM," ujar Akbar.

Kamrussamad juga menyoroti polemik bahan bakar minyak (BBM) yang menurutnya dapat mengganggu aktivitas ekonomi

daerah. Ia mengatakan keluhan masyarakat perlu menjadi perhatian seluruh partai Politik, bukan hanya partainya sendiri.

"Saya tadi menempatkan kriteria keempat, aspirasi publik. Kalau kami sebagai anggota partai menyerap aspirasi itu, itu harus juga diserap oleh seluruh partai yang ada. Bukan cuma kami," tuturnya.

Menurut Kamrussamad, gangguan pada rantai pasok dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran. Kondisi itu juga dinilainya berpotensi mengurangi kepercayaan investor domestik dan global sehingga mereka memilih bersikap wait and see.

"(Itu berkaitan dengan Kemen-

terian Komdigi) sebagai fungsi regulatornya," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Kamrussamad membahas persoalan judi online dan pinjaman online yang menjerat masyarakat. Ia menilai fungsi regulator Kementerian Komunikasi dan Digital perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menutup akses terhadap aktivitas ilegal tersebut.

Nama ketiga yang disorot adalah Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Kamrussamad mempertanyakan tindak lanjut atas permintaan Prabowo agar suku bunga pinjaman bagi pelaku UMKM diturunkan, mengingat menurutnya tingkat bunga selama ini masih berada di atas 20 persen.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ade Darmawan Respons Putusan MA, Tegaskan Gibran Tetap Sah Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.41 WIB



BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu Ade Darmawan merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Dia menyatakan putusan itu tidak berdampak hukum terhadap kedudukan Gibran sebagai wapres.

Ade mengatakan, pembatalan dokumen administratif tidak serta-merta menggugurkan hak konstitusional maupun tanggung jawab jabatan yang telah diemban Gibran.

"Kita ketahui semua bahwa apa pun terkait putusan itu tidak akan mempengaruhi jabatan wapres dalam hal ini. Dikarenakan bahwa

putusan gugurnya satu surat tidak menggugurkan hak dan tanggung jawab seorang wakil presiden," kata Ade dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).

Menurut Ade, legitimasi kemenangan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 telah diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

"Hal ini hanya menjadi polemik di dalam kaitannya perdebatan yang terjadi. Tapi apa pun itu, kita berpegang cuma satu, yaitu pada putusan MK yang menyatakan bahwa pasangan calon Prabowo dan Gibran sah," ujarnya.

Dari perspektif hukum pidana maupun hukum tata negara, kata Ade, Indonesia menganut prinsip hukum tidak berlaku surut. Karena itu, menurutnya, proses pemilihan yang telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diulang begitu saja.

"Saya rasa ini hal yang biasa karena ini sudah lewat. Jadi kalau hal yang lewat, karena hukum kita tidak mengenal, hukum kita itu hanya mengenal tidak berlaku surut. Jadi dia tidak akan berlaku ke depan. Artinya, apa yang sudah terjadi tidak mungkin bisa diulang lagi," pungkasnya.

Diketahui, MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan

(suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diterbitkan melalui e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.

Dalam gugatannya, Subhan Palal menggugat Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak penerbit dokumen. Dia mengajukan tiga petitum, yakni meminta pengadilan menyatakan surat keterangan penyetaraan tidak sah, memerintahkan pencabutan dokumen dari pihak yang menguasai atau memegangnya, serta mengabulkan seluruh permohonan penggugat

NASIONAL

Dorong Pemakzulan Gibran, Denny Indrayana Ngaku Sudah Komunikasi dengan PDIP

Oleh Redaksi · 30 Okt, 11.05 WIB



Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana. FOTO/Net.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengakui sudah membangun komunikasi dengan elite PDI Perjuangan (PDIP) terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Denny saat dikonfirmasi soal partai Politik lain yang telah didekati selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia mengklaim, PDIP merespons positif usulan tersebut.

"Saya komunikasi dengan teman-teman PDIP, eh mereka kelihatannya sedang berproses secara internal," kata Denny, dikutip Jumat (30/10/2026).

Kendati demikian, hingga saat ini dirinya belum melakukan pertemuan secara formal dengan partai berlambang banteng tersebut.

"Kalau pertemuan terbukanya belum, belum ada," ujarnya.

Denny enggan mengungkapkan siapa elite PDIP yang sudah berbicara secara informal dengan dirinya.

Dia juga tak bisa membeberkan lebih jauh bagaimana sikap PDIP terhadap opsi pemakzulan ini.

"Lebih bagus teman-teman PDIP yang jawab itulah (sikapnya). Saya sih optimis saja," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui telah bertemu Sekjen PKS

M Kholid untuk membahas aspirasi masyarakat tentang usulan Hak Angket ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Ya, kami memang bertemu, kami berdialog," kata Hasto saat ditemui di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

Hasto menilai, langkah koreksi harus dilakukan ketika realitas wapres terdelegitimasi akibat syarat usia dan pendidikan.

"Yang paling penting adalah sebelum suatu proses politik ini dijalankan, realitas bahwa ketika seorang wakil presiden terdeligitimasi kepemimpinannya akibat syarat usia dan syarat ijazah, ternyata lahir dari intervensi kekuasaan, ini yang harus kita koreksi bersama-sama," ujar Hasto.

NASIONAL

Denny Indrayana Sambangi PKS, Desak Parpol Mulai Proses Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 30 Okt, 11.00 WIB



BANDA ACEH - Denny Indrayana mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendorong partai Politik di parlemen memulai proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah Denny mencabut gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan memilih walkout dari persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Denny berharap partai politik, khususnya PKS, dapat mengambil inisiatif untuk membawa persoalan tersebut ke ranah politik dan konstitusional. Dia menilai PKS menjadi salah satu partai yang paling responsif terhadap persoalan yang dipersoalkannya.

Menurut Denny, jalur pengadilan tata usaha negara yang ditempuh sebelumnya tidak memberikan hasil yang diharapkan. Dia menyoroti sikap Kementerian Pendidikan selaku tergugat yang dinilai tidak kunjung menghadir-

kan bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Atas dasar itu, Denny memutuskan mencabut gugatan dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme politik di parlemen.

Meski demikian, pemakzulan presiden maupun wakil presiden bukan proses yang dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik. Mekanisme tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi dan melibatkan lembaga negara yang berwenang

NASIONAL

Pengacara Gibran: Walk Out Penggugat Tak Hormati Persidangan

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.41 WIB

BANDA ACEH - Penggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Prof. Denny Indrayana, dinilai tak menghormati Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat, karena meninggalkan lokasi persidangan.

Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menilai keputusan pihak penggugat meninggalkan ruang sidang menunjukkan sikap tidak serius dalam menjalani proses hukum.

Rullyandi menyampaikan penilaian tersebut setelah pihak penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan I, dan meninggalkan ruang sidang atau walk out dari ruang sidang PTUN Jakarta.

Menurut Rullyandi, pihak yang mengajukan gugatan seharusnya mengikuti mekanisme hukum acara yang berlaku untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di hadapan majelis hakim.

"Pada hari ini, kami dari tim kuasa hukum ingin menanggapi apa yang terjadi dalam persidangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Viral Teh Botol Sosro Diduga Bercampur Sabun Saat Demo di Bundaran HI

Oleh Redaksi · 29 Okt, 22.25 WIB

BANDA ACEH - Sebuah video yang memperlihatkan dugaan minuman Teh Botol Sosro bercampur zat menyerupai sabun menjadi perbincangan di media sosial.

Rekaman tersebut disebut diambil saat aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, dan langsung menarik perhatian warganet.

Dalam video yang beredar, seorang pria memperlihatkan kemasan teh kotak yang mengeluarkan busa ketika ditekan.

Ia mengaku mencium aroma wangi menyerupai sabun saat membuka kemasan tersebut.

Merasa ada sesuatu yang tidak biasa, pria itu memilih untuk tidak meminum minuman tersebut.

Ia menduga ada kandungan yang tidak semestinya di dalam produk yang ditemukannya, seperti dikutip HARIANACEH.co.id dari YouTube Tribun Sumsel.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam rekaman, minuman kemasan itu ditemukan tergeletak di jalan raya di kawasan Jakarta Pusat.

Namun, asal-usul produk serta penyebab munculnya busa dan aroma tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Menanggapi video yang ramai diperbincangkan, manajemen Teh Botol Sosro menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram resmi perusahaan.

Pihak perusahaan menyatakan tengah melakukan investigasi untuk menelusuri kejadian tersebut.

Langkah ini dilakukan guna memeriksa informasi yang beredar dan mengetahui penyebab munculnya dugaan kegagalan pada minuman dalam video.

Manajemen juga menegaskan bahwa informasi yang diterima akan ditelaah secara cermat dan objektif sebelum menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan menempuh jalur hukum.

Hingga kini, penyebab munculnya busa dan aroma menyerupai sabun dalam rekaman tersebut masih belum diketahui secara pasti.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Gibran Siap Buka-Bukaan Tapi Denny Indrayana Malah Mundur

Oleh Redaksi · 30 Okt, 19.33 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal langkah hukum pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, bersama tim kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan pencabutan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya, seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga," kata Gibran usai melaksanakan Salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jelambar, Jakarta Barat, 30 Oktober 2026.

Putra sulung mantan presiden dua periode Joko Widodo itu menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan pengadilan menjadi lembaga yang terhormat untuk mengungkap kebenaran.

"Setiap penduduk dan masyarakat kedudukannya sama di mata hukum. Saya hormati keputusan dari penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami berikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim," ungkapnya.

Di sisi lain, Gibran seolah menantang bahwa pihaknya telah menyiapkan semua dokumen yang siap ditunjukkan di muka persidangan untuk pembuktian.

"Kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya, tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mundur. Terima kasih, kita lanjut lagi kerjanya," tandasnya.

Gugatan hukum di PTUN Jakarta tersebut sebelumnya dilaayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana yang memberikan kuasa hukum kepada Denny Indrayana.

Objek sengketa yang dipersoalkan dalam gugatan ini adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D DI/KS/2019. Namun, di tengah proses persidangan yang mengagendakan pembuktian, kubu penggugat justru memutuskan mencabut gugatannya.

Sebelumnya, dalam persidangan di PTUN Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026, Denny Indrayana

bersama tim hukumnya memutuskan untuk walk out dan mengajukan pencabutan gugatan tersebut.

Denny beralasan, pihak Kementerian Pendidikan selaku tergugat tidak kunjung menghadirkan dokumen primer yang menjadi landasan hukum penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, meskipun majelis hakim telah berulang kali memberikan instruksi secara patut.

Sementara itu, tim kuasa hukum Gibran sempat melayangkan keberatan atas permohonan pencabutan tersebut. Kubu Gibran menilai langkah mundur pihak penggugat mencerminkan ketidakseriusan dalam menguji substansi perkara di muka persidangan.

NASIONAL

Ancam Parang, Pemuda Bejat di Labusel Perkosa Nenek 67 Tahun di Kebun Sawit

Oleh Redaksi · 30 Okt, 09.54 WIB



BANDA ACEH – Perbuatan bejat dilakukan pemuda berinisial N (21) di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara. Pelaku nekat memerkosanenek berusia 67 tahun di area perkebunan kelapa sawit.

Aksi keji tersebut terjadi saat korban tengah beraktivitas mencari lidi sawit di perkebunan warga pada Senin (19/10/2026) siang.

Pendamping korban sekaligus aktivis pemuda setempat, David Arjuna Sihombing menjelaskan, saat kejadian korban mendadak dihampiri pelaku N.

Pelaku kemudian merebut parang milik korban yang biasa digunakan untuk memotong lidi, lalu menggunakannya untuk mengancam keselamatan korban agar menuruti nafsu bejatnya.

"Pelaku tiba-tiba mendekati korban lalu mengambil parang yang dipakai mencari lidi sawit. Pelaku lalu mengancam korban,"

ujar David Arjuna Sihombing usai mendampingi korban melapor ke Mapolres Labuhanbatu Selatan, Kamis (29/10/2026).

Usai peristiwa memilukan tersebut, korban kemudian pulang ke rumah dan melaporkan kejadian keji yang dialaminya kepada keluarga.

Mengetahui identitas pelaku, pihak keluarga langsung mendatangi N. Saat diinterogasi oleh pihak keluarga, pelaku tak mampu mengelak dan mengakui semua perbuatannya.

Didampingi aktivis pemuda, korban selanjutnya melaporkan tindak pidana kekerasan seksual tersebut secara resmi ke Polres Labuhanbatu Selatan guna diproses hukum.

Saat ini, pelaku N telah diamankan dan ditahan di sel tahanan Mapolres Labuhanbatu Selatan. Petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif serta pendalaman untuk melengkapi berkas penyidikan.

NASIONAL

Aktivis 98: Rezim Prabowo Lebih Mengenyangkan Perut Gerombolannya daripada Rakyat

Oleh Redaksi · 29 Okt, 21.28 WIB

BANDA ACEH - Aktivis 1998, Jayadi Santoso, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pemerintah lebih mengutamakan kepentingan kelompok yang dekat dengan kekuasaan dibandingkan memenuhi kebutuhan masyarakat luas, terutama di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

"Rezim Prabowo lebih mengenyangkan perut gerombolannya daripada rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan anggaran besar, tetapi manfaat dan pengelolaannya harus benar-benar diawasi agar tidak lebih banyak dinikmati elite yang dekat dengan kekuasaan," kata Jayadi Santoso kepada wartawan, Kamis (29/10/2026).

Menurut Jayadi, besarnya anggaran MBG semestinya diikuti dengan transparansi, pemerataan manfaat, dan pengawasan ketat. Program yang menggunakan uang negara itu harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masya-

rakat, terutama anak-anak sebagai penerima program, bukan menjadi peluang ekonomi bagi segelintir pihak yang memiliki akses Politik.

Ia juga menyoroti dugaan adanya elite politik yang memiliki lebih dari lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika informasi tersebut benar, menurut Jayadi, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kepemilikan dan pengelolaan unit-unit pelayanan itu dilakukan, termasuk mekanisme penunjukan mitra serta potensi benturan kepentingan. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui data kepemilikan dan dokumen resmi.

Di sisi lain, Jayadi menilai kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok semakin membebani rumah tangga. Ketika harga pangan dan kebutuhan sehari-hari meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi tolok ukur dalam mengevalu-

asi keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintah.

"Rakyat tidak bisa hidup hanya dengan janji program besar. Yang dibutuhkan masyarakat adalah harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, dan kepastian ekonomi. Pemerintah harus menjelaskan langkah konkret untuk mengendalikan harga agar beban hidup rakyat tidak terus bertambah," ujarnya.

Jayadi juga mengkritik kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor. Ia menilai ketidakpastian kebijakan dan keraguan terhadap arah pengelolaan ekonomi dapat memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk menanamkan modal. Meski demikian, klaim bahwa investor Indonesia perlu diuji melalui data realisasi investasi, arus modal, dan perkembangan penanaman modal asing maupun domestik.

NASIONAL

Hashim Wanti-Wanti Rupiah Bisa Tembus Rp21.000 per Dolar AS

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.37 WIB

BANDA ACEH -Ketua Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo mewanti-wanti Rupiah bisa tembus Rp21.000 per Dolar AS jika persoalan transparansi pasar modal yang disorot Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak segera dibenahi.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto itu bahkan menyebut Rupiah bisa semakin lemah jika investor asing menarik dananya dari pasar saham Indonesia.

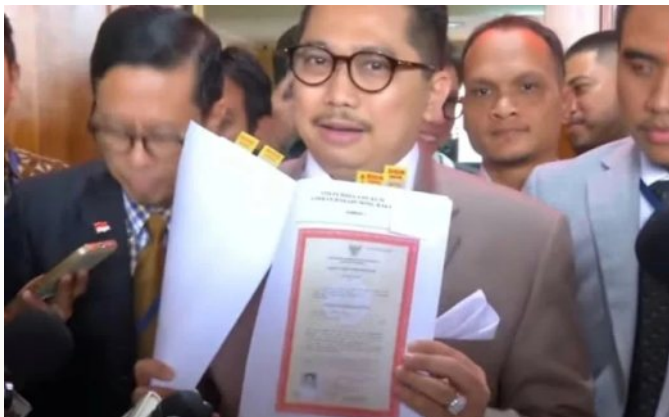
"Ini masalah sangat-sangat serius. Kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, Rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung bisa jadi Rp20.000 sampai Rp21.000, bahkan ada yang bilang Rp22.000 per Dolar AS," kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Hashim mengatakan, praktik goreng saham menjadi salah satu persoalan serius yang harus segera dihentikan.

NASIONAL

Pengacara Pamer Ijazah Gibran dari SD hingga S1 Dilampirkan dalam Jawaban di PTUN

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.34 WIB



Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menunjukkan salinan ijazah kliennya mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1) kepada wartawan se usai menjalani persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026.

Dokumen tersebut diperlihatkan satu per satu sebagai bagian dari penjelasan tim kuasa hukum mengenai riwayat pendidikan Gibran yang telah dilampirkan dalam jawaban tertulis kepada majelis hakim.

"Kami sudah siap untuk membacakan dan memperlihatkan di hadapan majelis hakim dan juga kepada rekan-rekan media sebagai

bentuk keterbukaan kami kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa riwayat pendidikan dari Bapak Gibran Rakabuming sudah kami lampirkan dalam jawaban kami setebal 69 halaman," kata Rully.

Ia kemudian memperlihatkan sejumlah dokumen yang disebut sebagai bagian dari riwayat pendidikan Gibran.

Dokumen tersebut antara lain ijazah sekolah dasar, ijazah sekolah menengah pertama, sertifikat pendidikan O-Level di Singapura, Certificate of Attendance dari UTS Insearch di Australia, serta dokumen Advanced Diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) Singapura.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id
Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Gibran Siap Buka-Bukaan di Sidang Ijazah PTUN: Tapi Penggugatnya Malah Cabut Gugatan

Oleh Redaksi · 30 Okt, 14.10 WIB



BANDA ACEH - - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap membuka seluruh dokumen riwayat pendidikan jika diperlukan dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Diketahui, penggugat yakni Mercy telah mencabut gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran di PTUN.

Gibran mengatakan, seluruh proses hukum harus dihormati. Menurutnya, keputusan mengenai kelanjutan gugatan maupun pencabutannya sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.

"Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya, seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga," kata Gibran usai salat Jumat di Masjid

Ar Ridho, Jelambar Utara, Jakarta, Jumat (30/11/2026).

Dia menegaskan, pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengungkap kebenaran. Selain itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Gibran juga menyatakan menghormati keputusan pihak penggugat apabila memilih mencabut gugatan tersebut. Dia menyerahkan kepada sepenuhnya proses selanjutnya kepada majelis hakim.

"Kita hormati keputusan dari penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami berikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim," ujarnya.

Meski demikian, Gibran mengaku telah menyiapkan seluruh dokumen riwayat pendidikan untuk keperluan sidang pembuktian. Dia bahkan menyatakan

siap membuka dokumen tersebut secara transparan apabila dibutuhkan dalam persidangan.

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian. Dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya, tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mencabut gugatannya," katanya.

Gibran berharap proses hukum yang berjalan di PTUN Jakarta dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait polemik dokumen pendidikannya tersebut.

Sebelumnya diberitakan, gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat Wapres Gibran Rakabuming Raka dicabut dari PTUN. Pihak penggugat, Mercy Sihombing, melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana, menyatakan

pencabutan dilakukan karena tidak ada bukti baru yang dilampirkan Gibran selaku pihak tergugat.

Denny mengatakan, pihaknya sebelumnya telah meminta Gibran melampirkan sejumlah bukti terkait riwayat pendidikannya. Namun, bukti-bukti tersebut tidak kunjung diserahkan dalam persidangan.

"Tetapi tergugat, entah dengan alasan apa, tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti itu. Terutama yang kami ingat di MK itu yang sempat agar kami pahami ada tiga," ujar Denny dalam sidang lanjutan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT dengan agenda penyerahan bukti di PTUN Jakarta, Kamis (29/10/2026).



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Denny Indrayana Walk Out dari Sidang Gugatan Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14.35 WIB

BANDA ACEH - Profesor Denny Indrayana, selaku penggugat dalam perkara gugatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyatakan memilih keluar dari ruang sidang atau walk out pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat, Kamis, 29 Oktober 2026.

Denny walk out karena menilai pihak tergugat belum menghadirkan bukti-bukti yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Gibran.

Dia mengatakan, telah berulang kali meminta kementerian selaku tergugat untuk menghadirkan dokumen yang mendasari penerbitan surat keterangan tersebut.

Permintaan itu, menurut dia, tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga melalui surat tertulis yang diajukan pada pekan sebelumnya.

"Yang menjadi dasar kami walk out meninggalkan ruang sidang adalah sudah berkali-kali kami meminta agar tergugat kementerian menghadirkan bukti-bukti lengkap dasar mereka menerbitkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Saudara Gibran, berkali-kali," kata Denny.

Namun, menurut Denny, bukti yang dihadirkan kementerian dalam persidangan justru didominasi peraturan, keputusan, dan undang-undang. Padahal, pihak penggugat meminta dokumen yang secara langsung menjadi dasar

penerbitan surat keterangan tersebut.

Ia menyebut, dalam persidangan hari itu, kementerian kembali memasukkan sembilan alat bukti yang menurutnya mayoritas berupa peraturan.

Denny juga mengatakan majelis hakim telah berulang kali mengingatkan tergugat agar menghadirkan bukti-bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.

"Dan ini lagi-lagi membuktikan tergugat tidak menghormati apa persidangan ini. Majelis yang meminta berkali-kali tidak ditanggapi. Kami yang meminta berkali-kali tidak ditanggapi," ujarnya.

Denny turut mempertanyakan sikap kementerian yang, menurut

keterangannya, telah menyerahkan sejumlah dokumen terkait persoalan tersebut dalam proses di Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak mengahdirkannya dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia mencontohkan sejumlah dokumen yang disebutkan telah disampaikan dalam proses di Mahkamah Konstitusi, antara lain Certificate of Attendance, transkrip nilai, dan dokumen enrolment.

"Kalau mereka tidak mau menyampaikan bukti-bukti itu di Peradilan Tata Usaha Negara, artinya kan mereka membedakan perlakuan ini. Artinya, ada yang ditutup-tutupi ini," kata Denny.



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pembalut Kena PPN 11 Persen Perlu Dikaji, PKB: Itu Kebutuhan Primer Bukan Gaya Hidup

Oleh Redaksi · 30 Okt, 14.17 WIB



BANDA ACEH - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap produk pemalut perempuan. Kebijakan ini dinilai kurang tepat karena pemalut bukan gaya hidup, melainkan kebutuhan primer.

Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana mengatakan, pemalut adalah kebutuhan pokok perempuan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan biologis dan kesehatan reproduksi. Sehingga, pemakaiannya tidak bisa dihindari.

"Pemalut itu kebutuhan primer perempuan. Bukan barang mewah, bukan gaya hidup, bukan produk yang bisa dipilih untuk dibeli atau tidak. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji ulang pengenaan pajak 11 persen terhadap pemalut," ujar Nadya di Jakarta, Jumat (30/10).

Mirisnya, di Indonesia masih ada perempuan yang belum bisa membeli pemalut secara layak. Kondisi ini bisa dijumpai di wilayah pinggiran atau pedesaan.

Kondisi perekonomian membuat warga memakai kain sebagai ganti pemalut. Realita seperti ini harus dilihat oleh pemerintah.

"Jangan hanya melihat dari sisi potensi penerimaan negara. Kita harus melihat realitas di lapangan. Masih ada perempuan di wilayah pinggiran yang bahkan belum mampu membeli pemalut layak dan terpaksa menggunakan kain. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai negara justru menambah

beban mereka melalui pajak," imbuhnya.

Nadya menilai, kebijakan perpajakan harus memiliki perspektif keadilan sosial dan kesetaraan akses. Jangan sampai kebijakan yang secara administratif dianggap sebagai sumber penerimaan negara justru menciptakan hambatan baru bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasarnya.

"Bagi perempuan, pemalut bukan pengeluaran insidental. Jika dikalkulasikan dalam setahun, uang yang harus disisihkan tidak sedikit. Karena itu, membebani pemalut dengan pajak sama saja menambah beban ekonomi perempuan atas kebutuhan biologis yang tidak bisa mereka hindari," ungkapnya.

Baginya, menstruasi adalah proses biologis perempuan yang terjadi secara alami. Negara perlu memberikan perhatian bahwa perempuan mendapat sanitasi yang baik agar kesehatannya terjaga.

"Naif sekali jika kebutuhan primer perempuan justru dibebani pajak tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Negara harus memastikan setiap perempuan, termasuk yang paling miskin dan tinggal di wilayah terpencil, bisa mendapatkan produk menstruasi yang layak," tegasnya.

Jika pemerintah tetap mempertimbangkan pengenaan pajak terhadap pemalut, Nadya mendorong agar tarifnya dibuat serendah mungkin dan tetap terjangkau.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



EKONOMI

Tom Lembong Prediksi Potensi Krisis Indonesia dalam 6-12 Bulan ke Depan...

Oleh Redaksi · 29 Okt, 21.58 WIB

BANDA ACEH - Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong memprediksi Indonesia berpotensi menghadapi krisis dalam enam hingga 12 bulan ke depan.

Ia memperkirakan peluang terjadinya krisis dalam periode tersebut berada di atas 50 persen.

Pernyataan itu disampaikan Tom saat menghadiri acara peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP), Rabu (28/10/2026).

"Hitungan saya mungkin potensi kita krisis dalam 6-12 bulan ke

depan itu di atas 50 persen," kata Tom.

Menurut Tom, krisis berpotensi memberikan dampak berat terhadap generasi muda. Meski demikian, ia mengingatkan agar anak muda tidak takut menghadapi situasi tersebut.

Tom menilai sejarah menunjukkan bahwa krisis terkadang menjadi momentum bagi generasi berikutnya untuk melakukan perubahan. Ia mencontohkan pengalaman sejumlah negara Eropa dan Indonesia saat menghadapi krisis pada 1998.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Denny Indrayana Cabut Gugatan Ijazah Gibran, Tim Hukum Wapres Justru Menolak

Oleh Redaksi · 30 Okt, 08.36 WIB



BANDA ACEH – Tim Pembela Hukum Gibran Rakabuming Raka menolak pencabutan gugatan yang dilakukan Denny Indrayana dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Denny Indrayana selaku penggugat surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka mencabut gugatannya dan meninggalkan ruang sidang.

Salah satu kuasa hukum Gibran, Sujana Donandi Sinuraya, mengatakan pencabutan gugatan tidak otomatis dikabulkan karena persidangan telah memasuki agenda jawaban.

"Karena persidangan sudah sampai ke tahap jawaban, apabila penggugat mencabut gugatannya tidak otomatis langsung bisa dikabulkan. Harus atas persetujuan

dari tergugat maupun tergugat II intervensi," kata Sujana saat dikonfirmasi di Cikarang, Jumat (30/10/2026).

Menurut Sujana, pihaknya sebagai tergugat II intervensi bersama tergugat menolak pencabutan tersebut.

Tim Kuasa Hukum Lengkapi Ijazah Gibran

tim kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka345

Tim hukum Gibran telah menyerahkan jawaban sekaligus melampirkan dokumen riwayat pendidikan Gibran dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.

"Kami sudah menyerahkan jawaban dan sudah melampirkan seluruh ijazah-ijazah lengkap dari Mas Wapres," ujarnya.

Dokumen tersebut, kata Sujana, tercantum pada halaman 50 hingga 55 dalam jawaban tim hukum.

Salah satu dokumen yang turut dilampirkan adalah Advanced Diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS), yang selama ini menjadi perhatian publik.

"Publik harus memahami bahwa sistem pendidikan Indonesia dan luar negeri tidak sama persis. Ada tingkatan-tingkatan yang harus dilihat sesuai kondisi dan peraturan di luar negeri," jelasnya.

Sebelumnya, penggugat mengajukan pencabutan gugatan karena menilai sejumlah dokumen yang mereka minta belum dihadirkan dalam persidangan.

Setelah pencabutan tidak disetujui, penggugat kemudian meninggalkan ruang sidang.

Persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan intisari jawaban dari tim hukum Gibran.

Sujana menegaskan pihaknya siap membuktikan dokumen pendidikan Gibran secara lengkap dalam tahap sidang pembuktian.

"Kami akan membuktikan dengan sejelas-jelasnya, seterusnya, dan selengkap-lengkap," kata Sujana.

Untuk agenda berikutnya, majelis hakim tetap akan memanggil para pihak, termasuk penggugat, dalam persidangan pekan depan.

Alasan Denny Indrayana Cabut Gugatan Ijazah Gibran di PTUN
Penggugat ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana mengungkapkan alasan walk out dan mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Adapun gugatan di PTUN ini terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.

NASIONAL

PKN Tolak Pemakzulan Gibran di Luar Jalur Konstitusi, Sentil Standar Ganda Parpol

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14.30 WIB



BANDA ACEH - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menolak upaya pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka apabila tidak dilakukan melalui mekanisme konstitusional. PKN menegaskan, setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus diselesaikan berdasarkan hukum dan ketentuan konstitusi.

Ketua Umum PKN I Gede Pasek Suardika menyatakan, penolakan terhadap upaya pemakzulan di luar jalur konstitusional bukan berarti partainya memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Pasek, PKN memiliki sikap Politik yang berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Mengingat, dalam Pilpres 2024 partainya tidak mengambil keputusan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Posisi PKN bertumpu pada prinsip yang lebih mendasar, hasil kedaulatan rakyat harus dihormati dan setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah," kata Gede Pasek kepada wartawan, Kamis (29/10).

Pasek menilai, hasil pemilu yang telah menjadi keputusan rakyat harus dihormati. Apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan pemilu, penyelesaiannya tentu harus ditempuh melalui perbaikan regulasi.

PKN mengingatkan agar ketidakpuasan terhadap situasi politik tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur konstitusional. Bagi PKN, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga kebutuhan terhadap aturan yang menjadi landasan kehidupan bernegara.

Pasek juga meminta partai-partai politik agar tidak menerapkan standar ganda dalam menyikap hasil pemilu. Menurutnya, partai politik tidak seharusnya menikmati keuntungan dari proses demokrasi, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi manuver politik yang dapat mengganggu legitimasi hasil pemilihan.

"Demokrasi membutuhkan konsistensi, bukan sekadar keluwesan dalam mencari keuntungan hasil pemilihan," cetusnya.

Di sisi lain, PKN mendesak Presiden dan DPR RI segera menuntaskan pembenahan undang-undang pemilu dengan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pembaruan regulasi dinilai penting untuk memastikan sistem pemilu berjalan sesuai konstitusi dan memberikan ruang kompetisi yang adil bagi seluruh peserta.

NASIONAL

Cabut Gugatan di PTUN, Kubu Mercy Sihombing Siapkan 5 Langkah Hukum Lain

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.45 WIB



BANDA ACEH - Kuasa hukum Mercy Sihombing, Denny Indrayana menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum lain setelah pihaknya mencabut gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Denny mengatakan, pihaknya masih mengkaji sejumlah jalur untuk mempersoalkan keabsahan riwayat pendidikan Gibran. Langkah ini dapat ditempuh melalui forum Politik maupun proses hukum.

"Kita sedang mempertimbangkan berbagai langkah," ujar Denny usai menghadiri sidang di PTUN Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dia menyampaikan sejumlah opsi yang dipertimbangkan, mulai dari forum politik hingga jalur peradilan etik, pidana, dan administrasi.

"Peradilan politik ini pemakzulan (impeachment), pemberhentian Saudara Gibran. Yang kedua adalah Peradilan TUN. Yang ketiga adalah Peradilan Etik," kata dia.

Terkait jalur etik, Denny mengatakan pihaknya telah mengajukan aduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, aduan tersebut masih dalam proses verifikasi.

"Yang keempat adalah Peradilan Pidana. Ada beberapa teman yang sudah mengajukan permohonan peradilan pidana. Yang kelima, kami sedang juga bersurat ke Komisi Ombudsman. Peradilan Administrasi," ucap Denny.

Dia menjelaskan, langkah ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam penerbitan suket penyetaraan pendidikan Gibran. Denny mempersoalkan dokumen pendukung yang menurutnya belum ditunjukkan oleh pihak terkait.

"Kenapa kami ke sana? Karena ya ini mal-administrasi dari kementerian, tidak kunjung menunjukkan bukti-bukti yang mereka punya. Heran juga, kenapa? Kalau mereka yakin surat keterangannya itu dikeluarkan dengan benar, kenapa buktinya tidak ditunjukkan? Dasarnya tidak ditunjukkan? Maka mal-administrasi itu kami bawa ke ORI sebagai peradilan administrasi," ucapnya.

Sebelumnya, Mercy Sihombing mencabut gugatan terkait suket penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran dalam perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Pencabutan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan di PTUN Jakarta yang beragendakan penyerahan bukti, Kamis (29/10/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Demo Mahasiswa Trisakti di Patung Kuda: Dua Tahun Tanpa Kabar Baik dari Rezim Prabowo

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.58 WIB

BANDA ACEH - Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10) sore.

Kedatangan massa ini membawa gelombang protes keras, salah satunya dengan menyerukan narasi bahwa selama dua tahun terakhir tidak ada berita baik dari rezim pemerintahan saat ini.

Hal ini disampaikan salah satu orator di atas mobil komando menyoroti persoalan bencana alam di Sumatra dan Kalimantan yang dinilai belum tuntas ditangani.

"Cukup dua tahun tak ada berita baik dari rezim ini. Bencana alam, sumatera kalimantan belum selesai (ditangani)," ujar orator wanita diatas mobil komando, Kamis (29/10).

Oleh karena itu, lanjut dia, mahasiswa sebagai agen perubahan tidak boleh berhenti bergerak dan bersuara melawan ketidakadilan.

Sebab, kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, sangat mempengaruhi kondisi masa depan.

"Kita merupakan agent of change, kita masih memiliki jalan panjang. Jangan sampai boomer

itu merusak jalan panjang kita," tambahnya.

Soroti Ketimpangan di Kalimantan

Senada dengan hal tersebut, Deva, orator lainnya, menyoroti ketimpangan energi di wilayah penghasil sumber daya alam.

Ia mengungkapkan bahwa Kalimantan yang memiliki tambang terbesar di Indonesia, namun pasokan listrik justru dipadamkan secara bertahap.

"Apa ini yang dinamakan merdeka," tegas Deva di atas mobil komando.

Ia juga mendesak agar publik tidak berhenti menyuarakan perso-

alan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Deva pun mempertanyakan apakah nantinya hutan yang terbakar akan berubah menjadi kebun sawit.

"Apakah lahan itu akan kembali jadi hutan atau berubah menjadi kelapa sawit atau tambang teman-teman. Pulihkan hutan Indonesia," katanya.

Ia juga menilai pemerintah abai dengan penderitaan masyarakat Sumatra, Kalimantan, dan Papua yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga tidak bisa bersekolah akibat kabut asap.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

5 BERITA

ACEH

Bupati Syech Muharram Saksikan Langsung Final Tilawatil Quran MTQ ke-35 Aceh Besar

Oleh Redaksi · 30 Okt, 22.17 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris menyaksikan langsung babak final cabang Tilawatil Quran golongan dewasa pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 Aceh Besar yang berlangsung di Kecamatan Kuta Baro, Kamis (29/10/2026) malam. Kehadiran Syech Muharram ke arena MTQ tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap penguatan syiar Islam serta komitmen dalam membangun generasi Qur’ani yang berakhlak mulia dan mencintai Al-Qur’an.

Salah satu peserta yang tampil pada babak final tersebut adalah Radhi Ukhrawi. Ia bersama finalis lainnya menunjukkan kemampuan terbaik dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an di hadapan

dewan hakim dan masyarakat yang memadati arena perlombaan.

Suasana khidmat menyelimuti jalannya perlombaan ketika para finalis melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Keindahan irama, ketepatan tajwid, penguasaan lagu, serta ketepatan makhraj menjadi bagian penting dalam penampilan para peserta pada babak penentuan tersebut.

Babak final ini menjadi kesempatan bagi para qari untuk memperlihatkan hasil pembinaan dan latihan yang telah dijalani. Selain menjadi ajang kompetisi, MTQ juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap kitab suci umat Islam tersebut.

Bupati Aceh Besar H Muharram Idris melalui kehadirannya mem-

berikan perhatian terhadap keberlangsungan pembinaan qari dan qariah di daerah itu. Ia kegiatan MTQ tidak sekadar menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membina nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan MTQ ke-35 Aceh Besar di Kecamatan Kuta Baro juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiah dan memperkuat silaturahmi antar masyarakat dari berbagai kecamatan dan gampong. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan terus terpelihara melalui berbagai kegiatan keagamaan.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap penyelenggaraan MTQ ke-35 ini semakin memotivasi generasi muda Aceh Besar untuk mempelajari, mendalami,

dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an,” ujar Syech Muharram.

Dengan pembinaan yang berkesinambungan, para qari dan qariah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mereka serta terus mengharumkan nama daerah pada ajang MTQ di tingkat yang lebih tinggi.

“Melalui momentum MTQ ke-35 Aceh Besar, komitmen membangun generasi Qur’ani diharapkan semakin kuat, sehingga nilai-nilai Al-Qur’an tidak hanya tercermin dalam keindahan lantunan ayat suci, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk karakter, memperkuat akhlak, dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius,” harapnya.

ACEH

Pemotor 17 Tahun Tewas dalam Kecelakaan di Aceh Barat

Oleh Aceh Barat · 30 Okt, 17.23 WIB



Penugas kepolisian sedang melakukan olah tempat kejadian perkara di jalan raya untuk mengumpulkan data, FOTO/ist

MEULABOH – Seorang pelajar berusia 17 tahun meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan truk tangki di Jalan Meulaboh–Nagan Raya, Desa Peunaga Rayeuk, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.

Korban berinisial R.F., warga Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna hitam. Sementara truk tangki Hino tronton berwarna hijau dikemudikan Gunawan (35), warga Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun petugas, kedua kendaraan melaju dari arah Nagan Raya menuju Meulaboh. Setibanya di lokasi kejadian, korban diduga berupaya mendahului truk dari sisi kanan.

Saat kedua kendaraan berada sejajar, setang kiri sepeda motor diduga bersenggolan dengan bagian samping kanan truk. Korban kemudian kehilangan kendali dan terjatuh ke badan jalan

hingga terlindas roda belakang kanan truk tangki.

Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pengemudi truk dilaporkan tidak mengalami luka-luka.

Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasat Lantas AKP Eko Suhendro mengatakan, personel Satlantas telah mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal, memeriksa tempat kejadian perkara (TKP), serta mengumpulkan keterangan saksi. Kedua kendaraan juga telah diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.

Polres Aceh Barat mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat berkendara, terutama ketika hendak mendahului kendaraan besar. Pengendara diminta memastikan jarak pandang, ruang gerak, dan kondisi lalu lintas aman sebelum melakukan manuver untuk menghindari kecelakaan fata.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

Diduga Keracunan MBG, Siswa dan Guru SMP 4 Banda Aceh Dirawat

Oleh Van · 29 Okt, 20.14 WIB

BANDA ACEH — Dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi perhatian setelah sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Banda Aceh dilaporkan mengalami gangguan kesehatan dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit (RS) Kesdam, Banda Aceh, Kamis, 29 Oktober 2026.

Insiden tersebut tidak hanya menimpa peserta didik. Sejumlah guru di sekolah itu juga dilaporkan mengalami gejala serupa setelah menyantap makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.

Berbagai informasi yang dihimpun mengenai adanya guru yang turut terdampak pada Kamis, 29 Oktober 2026. Namun, hingga informasi awal tersebut disampaikan, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah pasti korban maupun tingkat keparahan kondisi mereka.

Berdasarkan informasi awal, siswa dan guru mulai menunjukkan gejala yang diduga mengarah

pada keracunan makanan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipasok oleh salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pihak sekolah kemudian membawa mereka ke RS Kesdam untuk mendapatkan penanganan medis. Rumah sakit tersebut disebut berjarak sekitar lima menit perjalanan kendaraan dari sekolah.

Meski para korban telah dibawa ke rumah sakit, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami siswa dan guru itu belum dapat dipastikan. Pemeriksaan medis serta penelusuran terhadap makanan yang dikonsumsi diperlukan untuk memastikan apakah kejadian tersebut benar-benar disebabkan oleh menu MBG.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan insiden tersebut. Koordinator Wilayah BGN Banda Aceh, Fakhry, mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh sebelum menyampaikan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Kunjungi Yonif 112/Dharma Jaya, Pangdam IM Tekankan Disiplin dan Profesionalisme Prajurit

Oleh Redaksi · 29 Okt, 17.39 WIB

BANDA ACEH, ACEH BESAR – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P., M.M., melaksanakan kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri (Yonif) 112/Dharma Jaya di Aceh Besar, Kamis (29/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Pangdam IM untuk memberikan pengarah, membangkitkan motivasi, serta meneguhkan komitmen prajurit dalam menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, dan

melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.

Kedatangan Pangdam IM disambut langsung oleh Komandan Yonif 112/Dharma Jaya, Letkol Inf Dana Pranata, S.S.T.Han., M.S.I., beserta jajaran. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan jajar sebagai bentuk penghormatan dan tradisi satuan, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama para pejabat batalyon, yang terdiri atas Komandan Kompi (Danki) dan Perwira Seksi (Pasi).

Dalam arahnya, Pangdam IM menegaskan bahwa disiplin merupakan landasan utama dalam membentuk prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh, profesional, dan berintegritas. Setiap prajurit dituntut untuk senantiasa menaati aturan, menjaga sikap dan perilaku, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun nama baik satuan.

Pangdam IM juga mengingatkan bahwa kehormatan seorang prajurit harus senantiasa dijaga melalui pelaksanaan tugas yang dilandasi

tanggung jawab, loyalitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Karena itu, seluruh prajurit diharapkan menjadikan disiplin sebagai bagian dari karakter dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, baik saat berdinam maupun ketika berada di tengah masyarakat.

Selain memberikan pengarah, Pangdam IM turut memberikan penghargaan kepada prajurit Yonif 112/Dharma Jaya yang berhasil menorehkan prestasi dalam pelaksanaan tugas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

DKP Aceh Salurkan 64,95 Ton Bantuan Ikan di Aceh Selatan, Dukung Penanganan Stunting dan Pengendalian Inflasi

Oleh Hamdani · 30 Okt, 14.43 WIB



Ketua FORIKAN Kabupaten Aceh Selatan, Ny. Nafisah Mirwan, MS., bersama perwakilan DKP Aceh, Fitriani, S.Pi., M.Si., dan unsur terkait saat penyaluran bantuan hasil perikanan kepada masyarakat di 15 Gampong se-Kabupaten Aceh Selatan. Penyaluran tersebut merupakan bagian dari program DKP Aceh dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, penanganan stunting, serta

ACEH SELATAN – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh menyalurkan bantuan hasil perikanan sebanyak 64.950 kilogram atau 64,95 ton kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (28/10/2026). Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan konsumsi ikan, mendukung pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus berkontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah.

Penyaluran bantuan yang menjangkau masyarakat di 15 gampong tersebut turut menyasar wilayah lokus stunting sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, khususnya sumber protein hewani bagi keluarga dan anak-anak.

Salah satu lokasi penyaluran berlangsung di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhanhaji

Barat, dengan jumlah bantuan mencapai 4,1 ton hasil perikanan.

Dalam kegiatan tersebut, DKP Aceh diwakili Kasubkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Fitriani, S.Pi., M.Si., bersama tim. Penyaluran juga melibatkan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Aceh Selatan, Ny. Nafisah Mirwan, MS., yang turun langsung bersama unsur terkait untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sasaran.

Fitriani menyampaikan bahwa penyaluran bantuan hasil perikanan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Aceh melalui DKP Aceh dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan sekaligus membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pangan bergizi.

Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat di wilayah lokus stunting, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung pengendalian inflasi daerah.

"Ikan merupakan sumber protein hewani yang memiliki nilai gizi tinggi dan sangat penting bagi pertumbuhan anak serta kesehatan keluarga. Melalui penyaluran bantuan ini, kami berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi, sekaligus semakin terdorong untuk menjadikan ikan sebagai bagian dari konsumsi sehari-hari," ujarnya.

Ia menjelaskan, dari perspektif pengendalian inflasi daerah, penyaluran bantuan hasil perikanan diharapkan dapat membantu meringankan pengeluaran rumah

tannga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk dukungan sektor perikanan terhadap upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam menjaga keterjangkauan dan akses masyarakat terhadap bahan pangan sumber protein.

Dengan demikian, pemanfaatan hasil perikanan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung stabilitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua FORIKAN Kabupaten Aceh Selatan, Ny. Nafisah Mirwan, MS., mengatakan peningkatan konsumsi ikan perlu terus didorong karena ...

ACEH

Kabid GTK: Akhlak Lebih dari Sekadar Prestasi

Oleh Aceh Barat · 30 Okt, 11.59 WIB



Momen kebersamaan guru dan siswa pada acara silaturahmi di SMP 1 Woybar, FOTO/ist

MEULABOH — Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, H. Faisal, S.Pd., bersilaturahmi dengan kepala sekolah, guru, serta siswasw SMP Negeri 1 Woyla Barat dalam kegiatan pembacaan Surah Yasin dan Jumat Amal, Jumat (30/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, H. Faisal mengingatkan para siswa bahwa prestasi tidak hanya diukur dari keberhasilan meraih juara, tetapi juga dari akhlak, sopan santun, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama.

"Prestasi bukan hanya tentang mendapatkan juara, tetapi juga tentang akhlak yang baik, sopan santun, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama," pesannya.

Usai kegiatan, H. Faisal turut duduk bersama kepala sekolah dan para guru untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

Menurutnya, kepala sekolah yang mampu menggerakkan guru, serta guru yang dapat menginspirasi siswa, menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

"Kepala sekolah yang hebat mampu menggerakkan guru, guru yang hebat mampu menginspirasi siswa, dan kerja sama yang kuat akan melahirkan pendidikan yang bermutu," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh warga sekolah untuk memulai perubahan positif dari diri sendiri.

"Jangan menunggu sekolah menjadi baik, tetapi mulailah dari diri kita sendiri untuk menjadikan sekolah lebih baik," tegas H. Faisal.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan nilai-nilai religius, pembentukan karakter, dan semangat kebersamaan semakin tumbuh di lingkungan SMP Negeri 1 Woyla Barat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat, tutupnya.[]

Editor : Biro Meulaboh

ACEH

Posyandu Aceh Barat Bantu Anak Terdampak Bencana

Oleh Aceh Barat · 29 Okt, 16.55 WIB



Ketua Posyandu Kabupaten Aceh Barat, Afrinda Novalia, bersama DP3AKB menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada anak-anak terdampak bencana hidrometeorologi di SDN

MEULABOH - Ketua Posyandu Kabupaten Aceh Barat, Afrinda Novalia, S.E., M.M., bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menyalurkan bantuan bagi anak-anak terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Pante Ceureumen, Kamis (29/10/2026).

Bantuan diserahkan kepada siswa SDN Alue Lhok di Desa Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

Bantuan berupa pakaian sekolah, sepatu, dan tas tersebut menyasar lima sekolah, yakni TK Jambak, SDS Sikundo, SDN Keutambang, SDN Alue Lhok, dan SMPN 3 Pante Ceureumen.

Afrinda mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap perempuan

dan anak yang terdampak bencana, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan psikososial mereka.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga terdampak dan membantu anak-anak kembali menjalani aktivitas pendidikan dengan lebih baik.

"Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemulihan kehidupan keluarga terdampak bencana," ujar Afrinda.

Afrinda juga mengajak seluruh perangkat daerah dan pihak terkait untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kepedulian dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak pascabencana.[]

Editor: Biro Meulaboh

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

250 Siswa Komcad Matra Darat 2026 Tuntaskan Pendidikan di Rindam Iskandar Muda

Oleh Redaksi · 29 Okt, 20.06 WIB

BANDA ACEH, ACEH BESAR – Pangdam Iskandar Muda, Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P., M.M., menghadiri upacara penutupan Pendidikan Komponen Cadangan (Komcad) Reguler Matra Darat Tahun Anggaran 2026 di Rindam Iskandar Muda, Aceh Besar, Kamis (29/10/2026).

Pendidikan tersebut diikuti oleh 250 siswa dan telah berlangsung sejak 31 Agustus 2026.

Kedatangan Pangdam Iskandar Muda disambut langsung oleh Danrindam Iskandar Muda, Brigjen TNI Ali Imran, beserta jajaran. Upacara penutupan pendidikan dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan,

Mayjen TNI Immer Hotma Partogi Butarbutar, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup).

Penutupan pendidikan ini menandai berakhirnya rangkaian pembentukan dan pembekalan para siswa Komcad Matra Darat TA 2026. Selama mengikuti pendidikan, para siswa mendapatkan pembinaan untuk membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, menumbuhkan jiwa nasionalisme, serta memperkuat semangat bela negara sebagai bagian dari kesiapan dalam mendukung sistem pertahanan negara.

Melalui pendidikan tersebut, para lulusan diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai

yang telah diperoleh, khususnya disiplin, tanggung jawab, loyalitas, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Keberadaan Komponen Cadangan juga diharapkan dapat mendukung penguatan pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan penutupan tersebut turut dihadiri Irdam Iskandar Muda, para Asisten Kasdam Iskandar Muda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh atau yang mewakili, serta para undangan dan personel pendukung lainnya.

Penyelenggaraan Pendidikan Komcad Matra Darat TA 2026

merupakan bagian dari upaya penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran bela negara, semangat pengabdian, dan komitmen untuk berkontribusi dalam mendukung pertahanan negara.

Dengan berakhirnya pendidikan tersebut, seluruh lulusan diharapkan mampu menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari Komponen Cadangan secara profesional, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[]

ACEH

Wali Kota Sabang dan Ketua TP-PKK Salurkan Bantuan untuk Warga Membutuhkan

Oleh Redaksi · 30 Okt, 10.23 WIB



BANDA ACEH, SABANG – Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam bersama Ketua TP-PKK Kota Sabang, Nuri Farisal, mengunjungi Siti Rohamah, warga Jurong Keramat, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kamis (29/10/2026) sore. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi keluarga sekaligus menyerahkan bantuan guna meringankan beban kebutuhan hidupnya.

Kedatangan Wali Kota Sabang bersama Ketua TP-PKK dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, PP dan PA Kota Sabang, Iswandi, disambut Keuchik Gampong Kuta Timu, Tesar Heryadi, beserta perangkat gampong.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli H. Adam melihat langsung kondisi

keluarga Siti Rohamah yang selama ini berjuang memenuhi kebutuhan hidup di tengah keterbatasan ekonomi.

Sehari-hari, Siti Rohamah bekerja mencuci pakaian milik orang lain untuk mencari nafkah. Di tengah kesibukannya bekerja, ia juga harus mengasuh anaknya yang berstatus yatim.

Pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, dukungan terhadap keberlangsungan pekerjaannya turut menjadi perhatian dalam penyaluran bantuan.

Wali Kota Sabang kemudian menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan sejumlah kebutuhan lainnya. Bantuan dana juga diberikan untuk mendukung penyediaan peralatan mencuci yang digunakan

Siti Rohamah dalam bekerja, sehingga ia dapat terus menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban keluarga Ibu Siti Rohamah. Semoga bantuan ini juga bisa mendukung beliau untuk terus bekerja dan memenuhi kebutuhan anaknya,” harap Zulkifli.

Selain menyerahkan bantuan, kunjungan tersebut juga menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kota Sabang terhadap kondisi keluarga Siti Rohamah. Ketua TP-PKK Kota Sabang, Nuri Farisal, berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga sekaligus menjadi penyemangat bagi Siti Rohamah untuk terus berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan mengasuh anaknya.

Perhatian yang diberikan Pemerintah Kota Sabang disambut haru oleh Siti Rohamah. Ia menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Sabang, Ketua TP-PKK, serta jajaran Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang yang telah mengunjungi keluarganya dan memberikan bantuan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mendukung Siti Rohamah untuk melanjutkan pekerjaannya mencari nafkah.

Melalui kunjungan langsung tersebut, Pemerintah Kota Sabang berupaya memperkuat kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial.[]

SPORT

Prabowo Beri Bonus Rp3 Miliar untuk Atlet Peraih Emas Asian Games dan Asian Para Games

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.52 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto memberikan bonus Rp3 miliar kepada atlet peraih medali emas Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Bonus diserahkan langsung oleh Prabowo kepada para atlet Asian Games dan Asian Para Games di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan, besaran bonus atlet disesuaikan dengan kategori pertandingan. Atlet peraih emas nomor ganda atau berpasangan mendapat Rp2,4 miliar, sedangkan peraih emas nomor beregu memperoleh Rp1,5 miliar.

“Apresiasi langsung beliau berikan dengan langsung menyerahkan bonus sebesar Rp3 miliar untuk peraih medali emas. Tetapi untuk tentu kalau yang ganda atau yang berdua itu nilainya 2,4 dan kalau yang beregu nilainya 1,5 miliar,” kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (29/10/2026),

Erick mengapresiasi peningkatan bonus tersebut karena dinilai dapat membantu masa depan atlet. Dia berharap penghargaan itu sekaligus menghapus anggapan bahwa karier atlet tidak menjanjikan setelah mereka berhenti bertanding.

“Ini hal yang luar biasa. Saya rasa stigma-stigma bahwa masa depan atlet itu suram tidak benar, ya,” ujarnya.

Menurut Erick, Prabowo memandang profesi atlet sebagai karier yang membanggakan karena kontribusinya tidak hanya mengharumkan nama keluarga, tetapi juga bangsa Indonesia.

“Bapak Presiden menyampaikan ini justru bagian membangun karakter bangsa, membuka lapangan pekerjaan, dan Bapak Presiden tadi menekankan juga akan terus membangun keolahragaan berkelanjutan di sekolah-sekolah,” kata Erick.

Dia menambahkan, penguatan olahraga sejak usia sekolah menjadi bagian penting untuk menyiapkan generasi muda Indonesia menghadapi masa depan.

“Nah, ini saya rasa pesan yang baik karena kita tahu anak muda Indonesia adalah masa depan bangsa yang perlu diperkuat untuk menjalin tentu kekuatan bangsa di masa yang akan datang,” ujarnya.

Sebelumnya, Tim Indonesia menutup Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan raihan 39 medali, terdiri atas lima emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Capaian tersebut melampaui target empat medali emas dan menempatkan Indonesia di posisi ke-16 klasemen akhir.

Sementara itu, Indonesia meraih 73 medali pada Asian Para Games 2026. Kontingen Merah Putih mengoleksi 15 emas, 21 perak, dan 37 perunggu, sekaligus menempati peringkat kedelapan klasemen perolehan medali

NASIONAL

Ternyata Agus Suparmanto dan Taj Yasin Dipecat Gegara Satu Tahun Tak Ngurus PPP

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.31 WIB



BANDA ACEH -Langkah pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025-2030 melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 murni usulan DPW PPP seluruh Indonesia.

“Semua rekan-rekan pengurus wilayah, cabang dan anak cabang kecewa dengan Waketum dan Sekjen DPP PPP yang tak pernah mengurus partai sejak menjadi pengurus,” kata Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur (NTT), Djainudin Lonek melalui keterangan tertulis, Kamis 29 Oktober 2026.

Djainudin mengatakan bahwa SK Menteri Hukum tentang kepengurusan PPP keluar pada 6 Oktober 2025.

“Artinya genap setahun Agus Suparmanto dan Taj Yasin mangkir dari PPP,” kata Djainudin.

Karena itulah, kata Djainudin, sesuai AD/ART PPP, pengurus yang nyata-nyata tidak aktif lebih dari tiga bulan harus dievaluasi dan dicopot jabatannya dan diganti yang lain.

Selain itu, saat DPP PPP dan DPW se-Indonesia menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Makassar Februari 2026 lalu, Taj Yasin bukannya hadir bersilaturchami dengan kader dan berpikir keras bersama untuk kebangkitan PPP, malah bikin surat ke Kapolda Sulsel agar membatalkan kegiatan tersebut.

“Sungguh tidak masuk akal,” kata Djainudin.

Keanehan terbaru, saat struktural PPP bahu membahu menyusun pengurus sampai tingkat desa, tiba-tiba ketua PPP provinsi NTB, Bengkulu dan Banten dipecat Agus Suparmanto yang hanya wakil ketua umum bersama Taj Yasin sekretaris jenderal dan diganti dengan pelaksana tugas.

Pelanggaran yang bulat dan telanjang melampaui wewenang di AD/ART dan penggunaan surat keputusan dan stempel yang tidak sah, jelas-jelas sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi dan mandat partai.

“Tak ada tempat bagi pihak yang hanya membela kemauan pribadinya di partai milik umat,” pungkas Djainudin.

Diketahui, keputusan pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 yang dipimpin Ketua Umum PP Muhamad Mardiono Mardiono secara daring pada Selasa 27 Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id



Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

3 BERITA

EKONOMI

TP-PKK Sabang Apresiasi Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, Perkuat Edukasi Cinta Rupiah

Oleh Redaksi · 30 Okt, 22.37 WIB



Ketua TP-PKK Kota Sabang, Nuri Farisal, menyambut baik pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Kota Sabang yang digelar Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut. FOTO/Net.

SABANG - Ketua TP-PKK Kota Sabang, Nuri Farisal, menyambut baik pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Kota Sabang yang digelar Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut.

Kegiatan ini dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah sekaligus memperluas akses layanan penukaran uang hingga wilayah kepulauan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pulau Weh, Kantor Wali Kota Sabang, tersebut mencakup sosialisasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah serta layanan penukaran uang bagi masyarakat.

Nuri mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia yang menghadirkan

kan edukasi sekaligus layanan penukaran uang bagi masyarakat Sabang.

Menurutnya, pemahaman terhadap Rupiah perlu terus diperkuat karena mata uang nasional bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan dan identitas bangsa yang mempersatukan masyarakat Indonesia.

“Karena itu, sudah sepatutnya kita memiliki rasa cinta, kebanggaan, dan pemahaman yang baik terhadap uang Rupiah. Masyarakat tidak hanya perlu mengenal Rupiah, tetapi juga harus mampu merawat, menggunakan, dan memperlakukannya dengan baik,” kata Nuri dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026) sore.

Ketua TP-PKK Kota Sabang juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip 5J

dalam merawat uang Rupiah, yakni jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distapler, dan jangan dibasahi.

Kebiasaan sederhana tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga kualitas uang Rupiah agar tetap layak digunakan sebagai alat transaksi.

“Bagi Sabang sebagai daerah kepulauan, ketersediaan uang Rupiah dan kemudahan layanan penukaran tentu sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, baik di sektor pariwisata, perdagangan, maupun UMKM. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat, mulai dari generasi muda, pelajar, pelaku UMKM, hingga masyarakat di gampong,” tambahnya.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 merupakan program Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut yang berlangsung pada 27 Oktober hingga 1 November 2026 dengan mengusung tema “Dari Belawan ke Pulau Sabang, Rupiah Terjaga Negara Berdaulat”.

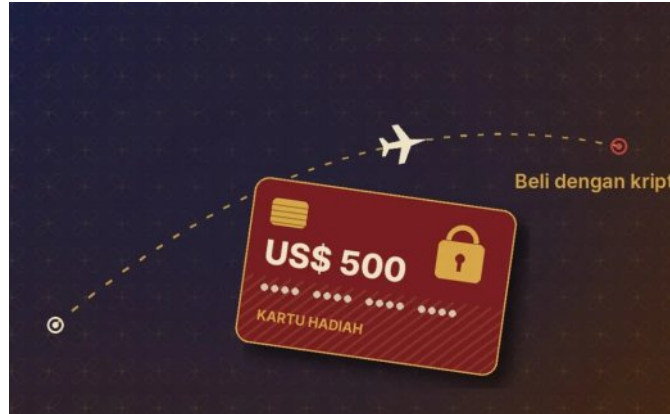
Ekspedisi ini menjangkau sejumlah pulau, yakni Pulau Semabilan, Pulau Kampai, Pulau Pusong, hingga Pulau Sabang, sebagai upaya memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan kualitas Rupiah di wilayah kepulauan.

Pemimpin Rombongan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, Nampati Y. Ginting, menjelaskan bahwa Sabang menjadi salah satu wilayah tujuan ekspedisi yang dilaksanakan Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut.

EKONOMI

Belanja lebih Privat di Amerika Serikat dengan Kartu Hadiah Kripto

Oleh Redaksi · 30 Okt, 09.23 WIB



Kuliah, mengunjungi keluarga, atau liburan: banyak orang Indonesia berangkat ke Amerika Serikat setiap tahun. Sebelum berangkat, ada dua pertanyaan yang jarang dipikirkan: seberapa banyak data belanja yang Anda tinggalkan, dan bagaimana membayar di sana tanpa membawa banyak uang tunai. Kartu hadiah digital dalam dolar menjawab keduanya.

Lebih sedikit data belanja yang tercatat

Setiap pembayaran dengan kartu bank meninggalkan jejak: nama Anda, apa yang Anda beli, di mana, dan kapan. Data itu tersimpan di bank, di toko, dan di pemroses pembayaran, lalu sering dipakai untuk iklan dan profil konsumen.

Kartu hadiah Visa atau Mastercard tidak diterbitkan atas nama Anda. Untuk belanja online, beberapa kartu meminta nama dan alamat penagihan yang Anda daftarkan sendiri, tanpa pemeriksaan identitas. Toko tetap melihat kartu yang dipakai, tetapi tidak melihat rekening bank Anda, dan pembelannya tidak muncul di mutasi rekening. Hasilnya, data belanja yang terkumpul tentang Anda jauh berkurang. Ini juga cocok untuk hadiah pribadi yang tidak ingin Anda lihat di mutasi rekening bersama.

Lebih sedikit uang tunai di perjalanan

Bandara, taksi, restoran, dan toko: dalam perjalanan, dompet keluar berkali-kali setiap hari.

Uang tunai yang hilang atau dicuri tidak kembali, dan membawa banyak dolar berarti menukar rupiah sebelum berangkat sambil menebak berapa yang akan dibutuhkan.

Dengan kartu hadiah dengan kripto, Anda menentukan nilainya sebelum berangkat, dengan kartu hingga US\$ 500, dan hanya membawa di ponsel apa yang ingin Anda belanjakan. Anggaran juga bisa dibagi: satu kartu untuk belanja, satu lagi untuk makan dan transportasi. Jika data kartu jatuh ke tangan yang salah, yang dipertaruhkan hanya saldonya, bukan rekening bank Anda.

Kartu utama tetap aman di rumah

Setiap toko, restoran, atau hotel yang memproses kartu Anda adalah satu tempat lagi di mana datanya bisa tersimpan atau disalin. Dari luar negeri, mengurus transaksi yang tidak Anda kenali dengan bank memakan waktu lebih lama.

Kartu hadiah Visa atau Mastercard dipakai di toko-toko Amerika Serikat yang menerima mereknya, sementara kartu bank Anda tetap aman. Jika terjadi masalah, kerugiannya terbatas pada saldo kartu hadiah. Karena sepenuhnya digital, tidak ada kartu fisik di saku yang bisa dibaca secara nirkontak di tengah keramaian.

Belanja di Amazon.com, diterima di Amerika Serikat

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



EDUKASI

Nilai Rapor Gibran saat Duduk di O-Level atau Kelas 10, Bahasa Inggris E, Matematika C

Oleh Redaksi · 29 Okt, 21.46 WIB

BANDA ACEH - Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menunjukkan salinan dokumen pendidikan kliennya mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1) kepada awak media sesuai menjalani persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dokumen tersebut diperlihatkan satu per satu sebagai bagian dari penjelasan tim kuasa hukum mengenai riwayat pendidikan Gibran yang telah dilampirkan

dalam jawaban tertulis kepada majelis hakim.

Rullyandi mengatakan, riwayat pendidikan Gibran tercantum dalam dokumen jawaban setebal 69 halaman. Dokumen itu telah diserahkan kepada majelis hakim, diunggah melalui sistem e-court, serta disampaikan kepada pihak penggugat dan tergugat.

“Hari ini kami hadir dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mengikuti agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, yaitu mendengarkan jawa-

ban dari pihak tergugat II intervensi, yaitu Bapak Gibran Rakabuming,” kata Rullyandi di PTUN Jakarta.

Rullyandi kemudian memperlihatkan sejumlah dokumen yang tercantum dalam berkas jawaban tim kuasa hukum. Pada halaman 50, terdapat salinan ijazah SD Gibran, disusul dokumen ijazah sekolah menengah pertama (SMP).

Selanjutnya, halaman 52 memuat riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura ...

EDUKASI

MBG Diusulkan Masuk Kurikulum Sekolah, Kepala BGN Ungkap Materi yang Bakal Dipelajari Siswa

Oleh Van · 29 Okt, 21.42 WIB

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan alasan mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan gizi masuk ke dalam kurikulum sekolah. Usulan tersebut bertujuan agar siswa memahami manfaat makanan bergizi, mulai dari karbohidrat, protein hewani, hingga sayuran.

Sudaryono dalam keterangan resminya pada Kamis, (29/10/2026) menjelaskan pendidikan gizi yang diusulkan tidak dimaksudkan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



INTERNASIONAL

Hari Pertama Bertempur, WNI Tentara Bayaran Rusia Langsung Tewas

Oleh Redaksi · 29 Okt, 20.09 WIB

BANDA ACEH - Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran untuk Rusia, dilaporkan tewas dalam pertempuran di Donetsk. Tragisnya, pria bernama Muhammad Taufiq itu tewas di hari pertamanya bertugas di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia itu.

Informasi yang dirilis Intelijen Pertahanan Ukraina (DIU) mengungkapkan, Taufiq sempat menjalani pelatihan militer selama 1 minggu lebih sebelum ditempatkan dalam pertempuran.

DIU mengungkapkan Taufiq sebagai pria kelahiran Sorong, 22 Mei 1978.

Sebelum pergi ke Rusia, dia tinggal di Surabaya serta sempat bekerja sebagai sopir taksi di Jakarta. Dia juga memiliki pengalaman kerja di Amerika Serikat (AS) dan fasih berbahasa Inggris.

Disebutkan, Taufiq menekan kontrak dengan militer Rusia di Korolyov, Moskow, pada 19 April 2026 yang berlaku selama setahun.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



EKONOMI

Bahlil Curiga Singapura Jual Lagi Pasokan Gas RI ke Luar Negeri

Oleh Redaksi · 30 Okt, 09.45 WIB



BANDA ACEH -Pasokan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair Indonesia ke Singapura diduga tidak seluruhnya berakhir sebagai konsumsi domestik, melainkan dijual kembali ke negara lain.

Dalam sebuah pernyataan di Istana Kepresidenan Jakarta, Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia selama ini telah mengirimkan 148 kargo LNG ke Singapura.

Namun, ia meyakini tidak seluruh pasokan tersebut dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri Singapura, melainkan ada yang dijadikan komoditas perdagangan. "Keyakinan saya bahwa pengiriman 148 kargo itu tidak semuanya itu dipakai untuk kepentingan Singapura, tapi sebagian dijadikan

sebagai trading untuk kemudian diekspor lagi ke negara lain. Tapi ada sebagian pasti untuk konsumsi mereka," kata Bahlil, dikutip Jumat, 30 Oktober 2026.

Selain LNG, Indonesia juga memasok gas melalui jaringan pipa dari Natuna dan daratan Sumatera. Total pasokan gas pipa yang dikirimkan ke Singapura mencapai 409,5 MM.

Saat ini, pemerintah mulai mengurangi sebagian pasokan tersebut sebesar 31 MM dari total 409 MM berdasarkan kontrak yang berlaku.

Bahlil menegaskan, kebijakan pengurangan pasokan itu belum melanggar perjanjian karena volume yang dikirimkan masih berada di atas batas minimum kontrak.

"Dengan yang ada itu, kita belum melanggar kontrak karena ada batas minimum, kan? Batas minimum itu belum kita lampau. Jadi nggak ada masalah, ya," tegasnya.

Dia menekankan, pemerintah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan untuk ekspor. Namun, apabila kebutuhan domestik telah terpenuhi, Indonesia tetap terbuka untuk memasok gas ke negara lain.

"Kan kita harus memprioritaskan kepentingan domestik kita, tapi kalau domestik kita sudah cukup, saya pikir kita harus juga mengirim ekspor ke negara lain, ya," kata Bahlil.

Sebelumnya, Indonesia mulai mengurangi pasokan gas alam ke

Singapura sejak Sabtu, 24 Oktober 2026, untuk mengalihkan lebih banyak energi bagi kebutuhan domestik.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong merespons dengan menyatakan importir gas negaranya akan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga hak dan kepentingan mereka berdasarkan perjanjian yang berlaku.

Sementara itu, Otoritas Pasar Energi Singapura mencatat pengurangan pasokan mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), atau kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian Singapura.

LINGKUNGAN

Polri Ungkap 245 Tersangka Karhutla, 5.859 Hektare Lahan Terbakar

Oleh Van · 29 Okt, 19.39 WIB

JAKARTA - Polri mencatat sebanyak 245 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir Oktober 2026.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam siaran langsung YouTube Polda Kalbar pada Kamis, (29/10/2026) menyebutkan penetapan tersangka tersebut berasal dari 287 laporan polisi yang ditangani jajaran kepolisian di sejumlah provinsi rawan karhutla.

"Terhadap pelaku perorangan itu, kami telah membuat 287 laporan polisi (LP) dengan luasan hutan yang terbakar seluas 5.859,12 hektar. Kemudian tersangka yang sudah kami tetapkan untuk pelaku perorangan dari seluruh polda-polda yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sebanyak 245 tersangka," kata Asep.

Asep menyebut penanganan perkara karhutla tersebut tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Barat, Riau ...

NASIONAL

Sidang Ijazah Jokowi, Saksi Ade Darmawan Konfirmasi Bukti Digital 15 Tautan Akun X Dokter Tifa

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14.19 WIB



BANDA ACEH - Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Dokter Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (29/10/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi pelapor Ade Darmawan untuk memberikan keterangan mengenai barang bukti digital berupa rekaman video, tangkapan layar, dan 15 tautan unggahan akun X milik terdakwa.

Di hadapan majelis hakim, Ade mengonfirmasi telah menjalani dua kali pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yakni pada 24 Juli 2025 dan 27 Februari 2026. Dia juga menjelaskan posisinya sebagai saksi pelapor dalam perkara yang menjerat Tifa uziah Tyassuma atau Dokter Tifa.

Dalam persidangan, jaksa menunjukkan barang bukti berupa sebuah flashdisk dan dokumen tangkapan layar yang segelnya telah dibuka. Ade menjelaskan, flashdisk tersebut berisi rekaman video dan kumpulan tautan dari akun X milik Dokter Tifa.

"Sebagai saksi, saya membawa barang bukti pada saat memberikan kesaksian, jadi saya menyerahkan beberapa dokumen termasuk akun X ini dan telah dimasukkan dalam flashdisk," ujar Ade di ruang sidang, Kamis (29/10/2026).

Jaksa kemudian membacakan rincian 15 tautan unggahan akun X tersebut. Unggahan yang diserahkan sebagai barang bukti itu berasal dari periode 3 April hingga 21 April 2025.

Ade mengonfirmasi keaslian tautan dan tangkapan layar yang ditunjukkan dalam persidangan. Dia menyebut bukti-bukti tersebut dikumpulkan bersama Lechuman sebelum keduanya memutuskan menempuh jalur hukum.

Selain unggahan di media sosial, Ade juga memberikan keterangan mengenai tayangan sebuah acara televisi yang menghadirkan Dokter Tifa sebagai narasumber. Dia mengaku menyaksikan tayangan tersebut melalui televisi maupun gawai bersama stafnya.

Menurut Ade, dalam acara itu Dokter Tifa menyampaikan sejumlah pernyataan mengenai analisis foto masa muda, bentuk gigi, hidung, hingga materi penelitian yang dikaitkan dengan foto ijazah yang beredar di internet.

Saat ditanya jaksa mengenai alasan mengumpulkan bukti, Ade mengatakan dirinya tergerak setelah melihat narasi yang menyebut ijazah Joko Widodo palsu. Dia mengaku mengetahui klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyatakan ijazah tersebut asli.

LINGKUNGAN

Satu Hari di Jakarta, Berbulan-bulan di Hutan: Soal Konsentrasi Kekuatan Negara

Oleh Syarifudin Brutu · 29 Okt, 14.52 WIB



Ilustrasi memperlihatkan kontras antara massa demonstran dan aparat di kota dengan

Pada 28 Oktober 2026, ribuan mahasiswa turun ke jalan di sekitar Gedung DPR dan Bundaran HI. Negara menjawabnya dengan 14.324 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait.

Titik dipetakan, tugas dibagi, jalur diatur, semuanya rampung dalam hitungan jam. Satu hal jelas dari sini: ketika negara mau, ia tahu persis cara memusatkan kekuatan.

Angka belasan ribu itu terasa akrab bagi yang mengikuti isu karhutla. TNI mengerahkan 14.258 personel untuk penanggulangan karhutla, sementara Polri menerjunkan ribuan personel di tujuh provinsi prioritas. Jumlahnya sama-sama belasan ribu. Bedanya, kekuatan itu tidak berkumpul di satu titik.

Ia tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan empat provinsi Kalimantan, mencakup pemadaman, patroli, pemantauan, pencegahan, hingga penanganan dampak.

Di Kalimantan Tengah saja, Satgas melibatkan sekitar 10.700 personel dari BPBD, kehutanan, pemadam, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga masyarakat.

Karena itu, dua angka tersebut tidak bisa dibandingkan mentah-mentah. Pengamanan demo adalah kekuatan terkonsentrasi: ribuan orang di beberapa kilometer jalan, selama beberapa jam. Penanganan karhutla adalah kekuatan terdiluasi: ribuan orang di jutaan hektare lahan rawan, selama berminggu-minggu.

Kepadatan personel di Jakarta memang tidak akan pernah sama dengan di hamparan gambut, dan tidak perlu sama. Yang layak digugat bukan kesetaraan jumlah, melainkan kesetaraan kesungguhan.

Di sinilah pertanyaan publik menjadi sah: apakah kecepatan dan kerapian yang tampak di Jakarta juga hadir di lahan gambut? Jawabannya tidak meyakinkan. Di titik api, personel justru sempat dinilai kurang.

Mensesneg menyebut pasukan tambahan dari Jawa diperlukan karena kekuatan di Kalimantan masih terbatas, dan Presiden mengerahkan sekitar 1.200 prajurit TNI tambahan. Bantuan itu tentu diperlukan, tetapi ia datang setelah kekurangan terasa. Itu ciri penanganan yang memadamkan, bukan mencegah.

Lebih jauh, mengerahkan banyak orang tidak otomatis memadamkan api. Kebakaran gambut menjalar di bawah permukaan dan tidak bisa ditaklukkan hanya dengan semangat dan seragam. Ia butuh peralatan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



OPINI

Kubu Jokowi-Gibran Panik

Oleh Redaksi · 30 Okt, 08.25 WIB



Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.((Advokat, Tim Advokasi Penegak Etika, Moral & Integritas Bangsa))

EHARI sebelumnya penulis memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan hadir dalam sidang PTUN pada Kamis, 29 Oktober 2026. Akhirnya terbukti, Gibran tak hadir.

Namun, penulis dan publik masih menyimpan pertanyaan. Akankah ijazah SD, SMP, SMA, hingga S1 Gibran benar-benar akan dihadirkan? Bukankah ajaib, jika Gibran punya ijazah SMA, karena faktanya dia mendaftar Pil-pres menggunakan Suket?

Ah, biar saja. Mungkin saja, Gibran lupa punya ijazah SMA, sehingga pesan Suket ke Kemen-dikdasmen. Baru di cek di lemari,

ijazah SMA itu ditemukan dan akan diperlihatkan.

Namun, begitu sampai hari H, ternyata ijazah SMA Gibran tak ada. yang dipamerkan, adalah Ser-tifikat Advanced Diploma dari The Management Development Institute of Singapore (MDIS)—yang disebut setara dengan kualifikasi A-Level, yang diklaim inilah pendidikan Gibran Jenjang Menengah Atas/Setara.

Lah kalau bukti ini, bukan barang baru. Ini barang lama yang telah diajukan ke MK dan tidak dipertimbangkan oleh MK.

Pihak terkait (buzzer Gibran) juga telah berbusa-busa menjelas-kan dokumen ini via ahli yang dihadirkan. Apa hasilnya?

Hakim Mahkamah Konstitusi tak menggubrisnya. Hakim MK

tak mengulasnya dalam pertimba-ngan. Kenapa demikian?

Sederhana. Karena syarat penca-lonan Gibran menggunakan Suket. Surat Keterangan No.

9149/DD.I/KS/2019) yang menye-but Gibran telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 UTS Inse-arch, Sydney, Australia, yang dini-lai memiliki pengetahuan setara dengan SMK Peminatan Akun-tansi & Keuangan di Indonesia, adalah dokumen yang dipertim-bangkan oleh MK.

Singkatnya, MK menyatakan tak ditemukan bukti ijazah SMA Gibran. Tak ditemukan pula bukti ijazah, sertifikat, diploma dari luar negeri yang bisa dijadikan dasar penyetaraan SMA.

Lalu, kenapa tiba-tiba Tim Hukum Gibran membawa barang lama ini ke PTUN?

Mereka beralih, dokumen Ser-tifikat Advanced Diploma dari The Management Development Institute of Singapore (MDIS) inilah yang menjadi dasar penyet-a-ran Gibran berpendidikan setara SMA. Padahal, sekali lagi, tidak ada satupun redaksi kalimat bahkan kata, yang disebutkan dalam Suket Gibran mengenai dokumen ini.

Lalu, apa yang melatarbelakangi tim hukum Gibran menggunakan bukti lama ini di PTUN?

Panik! Ya, kubu Gibran panik. Ibarat kapal, kapal Politik Jokowi-Gibran telah bocor oleh tembakan torpedo putusan MK. Pertimba-ngan MK yang menyatakan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan Gibran berijazah SMA atau sede-rajat, telah membuat lubang ...

OPINI

Pembelaan yang Justru Menjerat Leher Gibran

Oleh Redaksi · 30 Okt, 08.16 WIB



Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.((Advokat, Tim Advokasi Penegak Etika, Moral & Integritas Bangsa))

AKSUD hati membela, apa daya justru mencelakakan. "Membela dengan membabi buta, akhirnya menjerumuskan yang dibela."

Dua ungkapan diatas, rasanya pas untuk menggambarkan strategi Tim Pembela Hukum Gibran Rakabuming Raka, Patrialis Akbar, dkk. Betapa tidak, niatnya ingin menyakinkan hakim dan publik bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang bisa diseja-jarkan dengan SMA di Indonesia. Tapi, pembelaan itu justru mengu-atkan unsur pidana yang dilapor-kan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan Ormas Pejabat (Pencacara Jawara Bela Umat) di Bareskrim.

Penjelasannya demikian:

Gibran Rakabuming Raka dila-porkan, karena keterangan Suket miliknya (Surat Keterangan No. 9149/DD.I/KS/2019) menyebut Gibran telah menyelesaikan pendi-dikan Grade 12 UTS Insearch, Sydney, Australia, yang dinilai memiliki pengetahuan setara dengan SMK Peminatan Akun-tansi & Keuangan di Indonesia. Suket inilah, yang dijadikan syarat untuk pencalonan sebagai Wapres, untuk memenuhi ketentuan syarat pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana Capres dan atau Cawapres berpen-dirian minimal tamat SMA atau sederajat.

Namun, putusan MK menyata-kan bahwa tidak ditemukan bukti ijazah SMA, maupun Ijazah luar negeri, sertifikat luar negeri,

diploma luar negeri, yang bisa dijadikan dasar penyetaraan SMA atau sederajat. Bukti sertifikat kehadiran (Certificate of Atten-dance), ditegaskan oleh MK hanyalah bukti kehadiran, bukan bukti tamat atau kelulusan pendi-dikan yang bisa dijadikan dasar penyetaraan.

Semestinya, kubu Gibran fokus membuktikan bahwa Grade 12 UTS Insearch, Sydney, Australia, adalah pendidikan yang setara dengan SMA atau sederajat. Misalnya, dengan menunjukkan ijazah, diploma, atau sertifikat dari UTS, Insearch, Sydney, Aus-tralia. Grade 12 itu sendiri, tak ada di Insearch, Sydney, Australia. Ini hanyalah program pathway (brid-ging) menuju kuliah, bukan jen-jang pendidikan setara SMA.

Anehnya, kubu pembela Gibran justru membawa bukti berupa Ser-tifikat Advanced Diploma dari The Management Development Institute of Singapore (MDIS)--yang disebut setara dengan kualifikasi A-Level, yang diklaim inilah pendidikan Gibran Jenjang Menengah Atas/Setara.

Padahal, Surat Keterangan No. 9149/DD.I/KS/2019 yang diterbit-kan oleh Dikdasmen (diteken Dr Sutanto, SH, MA), tidak pernah mendasarkan keterangan penyet-a-ran pada dokumen Sertifikat Advanced Diploma dari The Management Development Insti-tute of Singapore (MDIS).

Fakta hukumnya, hanya ada dua keadaan yang keduanya menguat-kan terpenuhinya unsur surat palsu atau keterangan yang tidak benar, sebagaimana dimaksud dalam ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



OPINI

Model Diplomasi Bahlil Cederai Relasi RI-Singapura

Oleh Redaksi · 30 Okt, 08.21 WIB



Oleh:PLE Priatna

MENTERI Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belakangan, 24 Oktober 2026 lalu, telah berhasil "meng-gunting dalam lipatan diplomatik" berupa pengurangan pasokan gas ke Singapura--di tengah kontrak yang sedang berjalan itu.

Sementara di sisi lain, Singapura juga menyadari dan mengetahui bahwa sekitar 54 persen hingga 59 persen (berdasarkan data terbaru semester I 2026/Oktober 2026) Indonesia masih mengimpor BBM, termasuk RON 90 (Pertalite)--pendulum kestabilan ekonomi-Politik di tanah air itu--justru dari Singapura.

Nilai impor Indonesia, BBM dari Singapura itu mencapai sekitar 9,5 miliar Dolar AS (setara

Rp155-160 triliun). Angka dan volume impor signifikan dalam relasi hubungan diplomatik. Bagaimana bisa dalam konteks kontrak jangka panjang ke depan, Indonesia memberi peringatan keras.

Pesan dalam relasi diplomatik tidak lazim dan amat menakutkan--yaitu hanya akan memperpanjang kontrak ekspor energi dengan "negara tetangga yang kooperatif dan saling menghormati hubungan bilateral".

Sebuah tafsir karet, interpretasi yang sulit dirumuskan dalam kerangka relasi diplomatik karena terlanjur bergeser amat personal sekaligus bisa jadi malah berbenturan dengan kepentingan nasional kita.

Kita seharusnya berani berkaca diri dan melakukan koreksi. Di

tengah pasang surut isu penangan karhutla, luapan rasa keter-singgungan di sana sini, di seba-gian pejabat kita--apalagi menyangkut hantu baru status standalone MSCI di pasar saham ini--ikut menggelinding menjadi putaran isu yang menyulut ketega-ngan ke level hubungan diploma-tik bagi kedua negara, yang seha-rusnya dengan kedewasaan yang ada tidak perlu terjadi.

Di situ tak kalah menariknya--di tengah kisruh kecil di medan laga media sosial--diam-diam tampil "penumpang gelap" ala mantan Mendag yang tiba-tiba sibuk selain berdebat dengan mantan Wamenlu Dino Patti Djalal, malah secara intens mengompori hantu MSCI, seolah temuan hebat, seperti kasus beli di balik hubungan RI-Singapura.

Tindakan Menteri Bahlil menge-jutkan bagi kabinet PM Lawrence Wong di Singapura. Membaca situasi memanans guna mendingin-kan suasana batin benturan ini--Singapura berinisiatif mengi-rim pejabat penting setingkat Menlu Vivian Balakrishna ke Jakarta berjumpa dengan Menlu RI. Selanjutnya Presiden RI Pra-bowo Subianto pun berkenan menerima Menlu Singapura di Hambalang.

Overdosis Plus Offside

Coba bayangkan tidakkah kita merasa malu karena bertindak overdosis dan offside, termasuk tindakan yang justru memperma-lukan Presiden RI Prabowo Subi-anto?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ANEKA BERITA

7 BERITA

EDUKASI

PCOH XII 2026 Sukses Digelar, Pelajar Aceh Unjuk Inovasi Sains dan Teknologi di FMIPA USK

Oleh Hamdani · 30 Okt, 20.54 WIB



Dekan FMIPA USK, Prof. Dr. rer. nat. Ilham Maulana, menyerahkan piala dan penghargaan kepada para pemenang pada penutupan Physics Complex and Open House (PCOH) XII 2026 yang diselenggarakan HIMAFIS FMIPA USK di Banda Aceh, 27 Oktober 2026

BANDA ACEH – Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFIS), Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK), sukses menggelar Physics Complex and Open House (PCOH) XII 2026. Ajang kompetisi sains dan teknologi bagi pelajar SMA/MA sederajat tersebut berlangsung selama dua hari, 26–27 Oktober 2026, di lingkungan FMIPA USK, Banda Aceh.

Kegiatan tahunan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, mengasah kemampuan akademik, serta menunjukkan inovasi dan keterampilan di bidang sains dan teknologi.

Mengusung tema “Building Future Scientific Innovation Through Light and Optical Observation”, PCOH XII 2026 mengang-

kat peran cahaya dan observasi optik sebagai salah satu fondasi penting dalam pengembangan inovasi sains dan teknologi masa depan.

Ketua Departemen Fisika FMIPA USK, Dr. Saumi Syahreza, S.Si., M.Si., mengapresiasi konsistensi HIMAFIS dalam menghadirkan kegiatan edukatif yang mampu mempertemukan dunia akademik dengan pelajar tingkat menengah.

Menurutnya, tema yang diangkat tahun ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan lebih dekat penerapan ilmu fisika, khususnya bidang optik dan cahaya, dalam berbagai perkembangan teknologi modern.

“Melalui tema tahun ini, kami ingin memperkenalkan lebih dekat bagaimana ilmu fisika, khususnya bidang optik dan cahaya, menjadi

tulang punggung berbagai terobosan teknologi modern. Kami sangat bangga melihat antusiasme siswa-siswi yang hadir dan berkompetisi menunjukkan karya terbaiknya di FMIPA USK,” ujarnya.

Ketua Umum HIMAFIS FMIPA USK, Yudi Saputra, mengatakan PCOH XII dirancang tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan ilmu pengetahuan kepada generasi muda.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat mengubah pandangan pelajar terhadap fisika yang selama ini kerap dianggap sebagai mata pelajaran sulit dan kaku.

“HIMAFIS berkomitmen menjadikan PCOH sebagai jembatan untuk membumikan sains di kalangan pelajar. Kami berharap kegiatan ini dapat memicu rasa ingin tahu mereka untuk terus berekspe-

rimen dan nantinya melanjutkan studi di bidang sains dan teknologi,” tutur Yudi.

Sementara itu, Ketua Panitia PCOH XII, Riski Rahmat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sekolah, guru pembimbing, serta peserta yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, antusiasme peserta selama dua hari pelaksanaan menunjukkan besarnya potensi generasi muda dalam mengembangkan gagasan dan inovasi di bidang sains.

“PCOH ke-12 ini bukan sekadar ajang perlombaan untuk mencari siapa yang terbaik, melainkan wadah kolaborasi dan penyaluran ide-ide ...

OTOMOTIF

Suzuki NEX II, Motor Matic Irit dan Praktis untuk Aktivitas Harian hingga Ojol

Oleh Redaksi · 30 Okt, 18.53 WIB



Mobilitas sehari-hari membutuhkan kendaraan yang bukan hanya nyaman digunakan, tetapi juga hemat bahan bakar dan mudah dirawat. Apalagi bagi kamu yang setiap hari harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk bekerja, kuliah, menjalankan usaha, atau mencari penghasilan sebagai pengemudi ojek online (ojol). Karena itu, memilih motor matic irit menjadi salah satu pertimbangan penting agar pengeluaran transportasi tetap terkendali.

Salah satu pilihan yang menarik untuk kebutuhan tersebut adalah Suzuki NEX II. Motor matic ini hadir dengan desain modern, mesin berkapasitas 113 cc, sistem bahan bakar Fuel Injection, serta teknologi Suzuki Eco Performance (SEP). Kombinasi tersebut mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar sekaligus memberikan performa yang sesuai untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Selain menawarkan karakter berkendara yang praktis, Suzuki NEX II juga memiliki konstruksi dan sistem pengoperasian yang dirancang untuk penggunaan harian. Dengan perawatan berkala sesuai rekomendasi pabrikan, pemilik kendaraan bisa menjaga performa mesin, memperpanjang usia pakai komponen, dan mendukung kenyamanan berkendara dalam jangka panjang.

Mengapa Suzuki NEX II Cocok untuk Kendaraan Harian?

Kendaraan harian idealnya memiliki karakter yang praktis, ekonomis, dan tidak merepotkan ketika digunakan. Suzuki NEX II menawarkan sejumlah karakteris-

tik yang mendukung kebutuhan tersebut.

1. Teknologi Mesin yang Mendukung Efisiensi Bahan Bakar

Salah satu daya tarik Suzuki NEX II adalah penggunaan teknologi Suzuki Eco Performance (SEP). Teknologi ini dikembangkan untuk mendukung keseimbangan antara performa mesin dan efisiensi bahan bakar.

Suzuki NEX II menggunakan mesin 4 langkah, satu silinder, berpendingin udara dengan kapasitas 113 cc. Sistem bahan bakarnya sudah menggunakan Fuel Injection (FI), sehingga proses penyaluran bahan bakar dilakukan secara elektronik sesuai kebutuhan kerja mesin.

Kombinasi tersebut membuat NEX II relevan bagi pengguna yang mengutamakan efisiensi dalam perjalanan sehari-hari. Terlebih, penghematan bahan bakar menjadi hal penting ketika kendaraan digunakan hampir setiap hari.

Namun, konsumsi BBM aktual tetap dipengaruhi beberapa faktor, seperti kondisi lalu lintas, beban kendaraan, tekanan ban, gaya berkendara, dan kondisi mesin.

2. Bobot Ringan untuk Mobilitas di Perkotaan

Kemudahan mengendalikan kendaraan juga menjadi pertimbangan penting, khususnya ketika harus melewati jalanan perkotaan yang padat.

Suzuki NEX II memiliki berat kosong sekitar 93 kg. Bobot tersebut mendukung karakter kendaraan yang praktis untuk bermanuver, berpindah jalur sesuai kondisi lalu lintas, dan digunakan dalam perjalanan sehari-hari.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Indonesia Model Dunia Moderasi Beragama, Mengenaskan!

Oleh Rut sw · 30 Okt, 17.00 WIB



Keindahan dalam keberagaman dan persatuan antarumat beragama.

EPULANG Menteri Agama Nasaruddin Umar dari pertemuan tokoh agama dunia, di Assisi, Italia, beliau membawa sejumlah peluang kerja sama internasional antara Kementerian Agama dan Masjid Istiqlal dengan sejumlah negara dan perguruan tinggi di Italia serta Vatikan, dari Inggris, Australia, dan Pakistan.

Bahkan, gagasan diplomasi keagamaan yang ia usung mendapat respons positif.

Ketertarikan tersebut menurut Nasaruddin, menunjukkan pengalaman Indonesia dalam mengelola keberagaman dan menjaga kehidupan beragama yang moderat semakin mendapat perhatian masyarakat internasional.

Terbukti ada dua perguruan tinggi yang ingin mempelajari pengalaman Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk.

Salah satunya adalah PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabici e d'Islamistica/Institut Kepasuan untuk Studi Arab dan Islam) binaan Takhta Suci Vatikan.

Kerjasama ini dapat menjadi ruang pembelajaran bersama. Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola kemajemukan masyarakat, sementara Vatikan menyimpan kekayaan literatur dan tradisi keilmuan yang dapat menjadi sumber pembelajaran.

Selain itu, Nasaruddin mengatakan salah satu titik temu yang menghubungkan Indonesia dan Vatikan adalah komitmen untuk membela kelompok masyarakat yang mengalami penindasan tanpa membedakan latar belakang agama.

Moderasi Beragama Ide Batil Buah Sekulerisme

Kerjasama ini mengingatkan kita pada sisi kelam sejarah Islam di Indonesia akibat ulah seorang orientalis dan penasihat pemerintah Belanda, Christiaan Snouck Hurgronje.

Semula rakyat Aceh menerima dan menghormatinya karena keilmuan yang dimilikinya, namun berubah menjadi tokoh kontroversial hingga pengkhianat.

Snouck Hurgronje berpura-pura masuk Islam dan menggunakan nama samaran Abdul Ghaffar.

Ia bahkan tinggal di Mekkah pada tahun 1884–1885 untuk mempelajari jemaah haji asal Nusantara dan mengumpulkan informasi intelijen demi kepentingan pemerintah Belanda.

Ia merumuskan kebijakan agar pemerintah Belanda tidak membe-rangus Islam secara keseluruhan, melainkan membaginya menjadi dua: membolehkan ibadah ritual

(Islam religius), tetapi menindak tegas segala bentuk Islam politik yang berpotensi melahirkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme.

Inilah awal mula sikap sekuler dan moderasi beragama yang dikenalkan kepada kaum muslim dengan harapan Islam hancur demikian pula pemeluknya.

Kala itu, semangat mengusir penjajahan sangat masif dan para ulama yang berdiri di garda terdepan.

Menyerukan jihad, tak hanya ingin menghapus penjajahan tapi juga menetapkan setiap bumi dipimpin syariat.

Bukan hukum kafir. Jelas ini sangat merepotkan penjajah. Kebijakan memisahkan agama dari kehidupan, iman sah dari pemeluknya hingga hari ini masih dianggap cara paling ...

LINGKUNGAN

Belum Usai! Titik Panas Nasional Bertambah 118, Karhutla Papua Jadi Sorotan

Oleh Van · 30 Okt, 14.54 WIB



Kobaran api yang menghancurkan hutan ini menjadi pengingat tragis akan ancaman kebakaran hutan bagi ekosistem kita.

Papua — Titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia bertambah menjadi 118 titik, menurut keterangan Kementerian Kehutanan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Jumlah tersebut meningkat 39 titik dibandingkan sehari sebelumnya.

Papua Selatan menjadi wilayah dengan sebaran tertinggi, yakni 84 titik panas, di tengah laporan kebakaran yang mengancam permukiman dan masyarakat adat di Merauke.

Papua Selatan Catat 84 Titik Panas

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, sebaran titik panas lainnya berada di Kalimantan Timur sebanyak 24 titik, Sulawesi Selatan lima titik, Sulawesi Tengah empat titik, dan Sulawesi Barat satu titik.

Kementerian Kehutanan menjelaskan, titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit.

Angka tersebut tidak bisa langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar.

“Karena itu, groundcheck, patroli, dan pengecekan langsung tetap dilakukan,” tulis Kementerian Kehutanan dalam siaran pers Nomor SP.652/HKLN/10/2026.

Kebakaran Kimaam Ancam Masyarakat Adat

Sorotan juga datang dari Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Akun Threads

@waansyahda pada Rabu, 28 Oktober 2026, melaporkan kebakaran meluas di Kampung Yanggandur dan Kampung Turiram.

“Sejumlah rumah warga dilaporkan terbakar, sementara warga adat menghadapi kepungan asap dengan perlindungan seadanya,” tulis akun tersebut.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga serta lingkungan yang menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat adat setempat.

Penanganan Karhutla Masih Berlangsung

Dalam perkembangan penanganan karhutla, BNPB melaporkan total lahan terbakar di wilayah Papua mencapai sekitar 2.393 hektare.

Dari jumlah tersebut, sekitar 161,5 hektare berada di Papua Selatan.

BNPB menyebut pemadaman di sejumlah wilayah Papua menghadapi kendala akses lokasi yang sulit dijangkau.

Hujan yang mulai turun di beberapa titik diharapkan membantu meredam pergerakan api dan asap.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan menyatakan Papua Selatan masih berstatus tanggap darurat karhutla hingga 28 November 2026.

Pemerintah dan tim gabungan masih melakukan pemantauan serta penanganan di wilayah terdampak. (*)

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



SPORT

Marc Marquez Tercepat di Practice MotoGP Malaysia 2026, Bagnaia Terlempar dari 10 Besar

Oleh Redaksi · 30 Okt, 15.58 WIB



Marc Marquez berhasil mengungguli adiknya, Alex Marquez (Gresini Racing), yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) melengkapi tiga besar dengan menempati peringkat ketiga.

Pedro Acosta (Red Bull KTM) berada di posisi keempat, disusul Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) di urutan kelima.

Hasil tersebut memastikan 10 pebalap tercepat berhak melaju langsung ke sesi kualifikasi kedua (Q2). Sebaliknya, Francesco Bagnaia harus puas berada di luar 10 besar setelah mengalami kecelakaan menjelang berakhirnya sesi.

Di Giannantonio Sempat Kuasai Posisi Teratas

Persaingan di Sirkuit Sepang berlangsung sengit sejak awal practice. Marco Bezzecchi (Aprilia)

menjadi pebalap pertama yang mencatatkan waktu tercepat setelah lima menit sesi berjalan.

Namun, posisinya tidak bertahan lama setelah Johann Zarco (LCR Honda) mengambil alih pimpinan. Fabio Di Giannantonio kemudian menunjukkan kecepatannya dengan merebut posisi pertama pada menit kedelapan melalui catatan waktu 1 menit 57,982 detik.

Di Giannantonio saat itu unggul atas Alex Marquez dan Zarco yang berada di belakangnya.

Sementara persaingan di barisan depan berlangsung ketat, sejumlah pebalap mengalami insiden. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) terjatuh di tikungan keempat. Jorge Martin (Aprilia), yang sebelumnya dinyatakan fit oleh tim medis, juga sempat kehilangan kendali di tikungan ke-12.

Marc Marquez sendiri sempat berada di posisi kesepuluh sebelum memperbaiki catatan waktunya dan naik ke urutan kedelapan. Namun, ia kemudian terjatuh di tikungan ke-15 sehingga harus kembali ke garasi.

Marc Marquez Ambil Alih Pimpinan

Memasuki paruh akhir sesi, Di Giannantonio masih memimpin persaingan di depan Alex Marquez. Namun, perubahan posisi kembali terjadi setelah Diogo Moreira (Pro Honda LCR) tampil impresif dan merebut posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 57,913 detik.

Persaingan semakin menarik ketika Marc Marquez mulai meningkatkan kecepatannya. Pebalap asal Spanyol itu akhirnya mengambil alih posisi pertama

dengan torehan waktu 1 menit 57,000 detik.

Catatan tersebut sekaligus menempatkannya di puncak daftar pebalap tercepat, mengungguli para pesaingnya.

Maverick Vinales (KTM Tech3) sempat merangsek ke posisi kedua sebelum akhirnya digeser Pedro Acosta. Persaingan posisi kedua kemudian berlanjut ketika Alex Marquez berhasil menyalip Acosta pada lima menit terakhir sesi.

Bagnaia Gagal Tembus 10 Besar

Nasib berbeda dialami Francesco Bagnaia. Pebalap Ducati Lenovo itu kesulitan mempertahankan posisinya sepanjang sesi practice.

LINGKUNGAN

Kasus Hutan Aceh Singkil: Publik Ragukan Konsistensi Aparat

Oleh Ahmad Fadhli · 30 Okt, 10.30 WIB



Pemandangan bukit di kawasan Situbuh-Tubuh, Aceh Singkil, yang tertangkap dalam suasana mendung. FOTO/Dok. Istimewa.

ACEH SINGKIL — Penanganan perkara dugaan kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Aceh Singkil kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya mendapat perhatian dalam Rapat Koordinasi Lembaga Wali Nanggroe dan diberitakan sejumlah media, kini muncul pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum, status alat berat yang diduga berkaitan dengan perkara, serta dugaan kejanggalan dalam penanganan pihak yang diduga bertanggung jawab.

Sorotan ini bukan karena perkara tersebut tidak berjalan, melainkan karena proses penanganannya dinilai perlu memperoleh penjelasan yang lebih terbuka. Berdasarkan informasi yang disampaikan narasumber, berkas perkara dugaan kerusakan kawasan hutan yang dilaporkan sejak 17 April 2025 dan ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 24 Agustus 2026 masih berstatus P-19 hingga Senin, 26 Oktober 2026.

Status P-19 menunjukkan bahwa penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk yang diberikan. Oleh karena itu, perkembangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dijelaskan kepada publik, terutama mengenai kelengkapan pembuktian dan tindak lanjut penyidik atas petunjuk jaksa.

Dua Perkara, Publik Pertanyakan Perbedaan Penanganan

Narasumber mempertanyakan perbedaan langkah penanganan antara perkara dugaan kerusakan kawasan hutan yang diduga menggunakan alat berat jenis excavator

dan perkara lain terkait kendaraan pengangkut kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan.

Menurut keterangan narasumber, dalam perkara pengangkutan kayu tersebut, aparat kepolisian melakukan penindakan dalam waktu sekitar 2 x 24 jam, mengamankan terduga pelaku, menetapkan sebagai tersangka, serta mengamankan dan menyita kendaraan beserta kayu yang dijadikan barang bukti.

Sementara itu, dalam perkara dugaan kerusakan kawasan hutan yang melibatkan penggunaan excavator, penanganannya telah berlangsung sejak laporan dibuat pada April 2025. Hingga 26 Oktober 2026, menurut informasi yang diterima redaksi, berkas perkara masih berstatus P-19.

Perbedaan perkembangan kedua perkara tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum dan pertimbangan penyidik dalam mengambil tindakan. Apakah perbedaan itu disebabkan oleh karakteristik perkara, kecukupan alat bukti, perbedaan unsur tindak pidana, atau faktor lain yang dapat dijelaskan secara objektif?

Perbandingan ini tentu tidak serta-merta membuktikan adanya perlakuan yang tidak setara. Setiap perkara memiliki karakteristik dan kebutuhan pembuktian tersendiri. Namun, penjelasan yang transparan diperlukan agar masyarakat dapat memahami dasar perbedaan langkah penegakan hukum tersebut.

Muncul Dugaan Indikasi Pergantian Terduga Pelaku Utama

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



HIBURAN

Mahasiswa Palsu Ditangkap Ormawa Undira, Ngaku Dibayar Ikut Aksi Sumpah Pemuda Bareng Raffi Ahmad dan Willie Salim di Bundaran HI

Oleh Redaksi · 30 Okt, 09.58 WIB



BANDA ACEH -Seorang pria yang mengenakan jaket almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) dan mengikuti kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di BUndaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat pada hari Kamis, 29 Oktober 2026 terungkap.

Ia merupakan seorang pria bernama Bayu Setiadi alias Dino, ternyata ia bukanlah Mahasiswa Undira, melainkan massa bayaran yang berikan imbalan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dan Willie Salim, serta diikuti oleh unsur Kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga TNI.

Dalam video pengakuan dan klarifikasinya, Bayu alias Dino mengaku bahwa dirinya memang bukanlah Mahasiswa Undira seperti perkiraan publik setelah dirinya diwawancara media massa atas aksi damainya di kawasan Bundaran HI dengan mengenakan jaket almamater kampus tersebut.

“Saya Bayu Setiadi alias Dino, saya adalah orang yang ada di video ini. Saya di sini berhak mengklarifikasi bahwa saya bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya mengikuti acara deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 berdasarkan undangan dari Komunitas dan saya dibayar,” kata Bayu, Kamis (29/10/2026) malam.

Lantas mengapa dirinya bisa sampai bisa mengenakan jaket

almamater tersebut, Bayu mengaku bahwa dirinya hanya diberikan saat mengikuti aksi itu tanpa ia mengetahui asal usulnya.

“Menegenai almamater yang saya kenakan itu diberikan kepada saya tanpa saya ketahui asal usulnya,” ujarnya.

Atas kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pelurusan informasi, Bayu menyampaikan ucapan terima kasih kepada organisasi kemahasiswaan Undira.

“Saya berterima kasih kepada rekan-rekan ormawa Undira yang memberikan saya kesempatan klarifikasi saya tanpa mengintimidasi dan menjamin keamanan saya,” ucapnya.

Sekaligus, Bayu menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan atas

tindakannya tersebut, khususnya civitas akademika Universitas Dian Nusantara.

“Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan terutama kepada pihak Universitas Dian Nusantara,” lanjut Bayu.

Terakhir, ia juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang ia perbuat dengan menerima pekerjaan sebagai mahasiswa palsu dan ikut demo bayaran tanpa menelaah lebih jauh dampak buruk yang ditimbulkan.

“Di sini saya memohon maaf tanpa adanya paksaan dan ini murni kesalahan saya yang tidak teliti menindak suatu pekerjaan,” pungkasnya

REDAKSI

PENERBIT	PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI	Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA	Adam
REDAKTUR	Hayat
SEKRETARIS REDAKSI	Ola
Jurnalis	
Banda Aceh:	
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR	12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani	
Bireuen:	
1. M. Ilham Sakubat	
Lhokseumawe:	
1. Yoppi	
Aceh Barat:	
1. Kurniawan	
Jawa Timur:	
1. Rut Sriwahyuni	
Fotografer:	
1. Mishabul Amin	
2. Nazaruddin	
Social Media Manager:	
1. Syukur M. Amin	